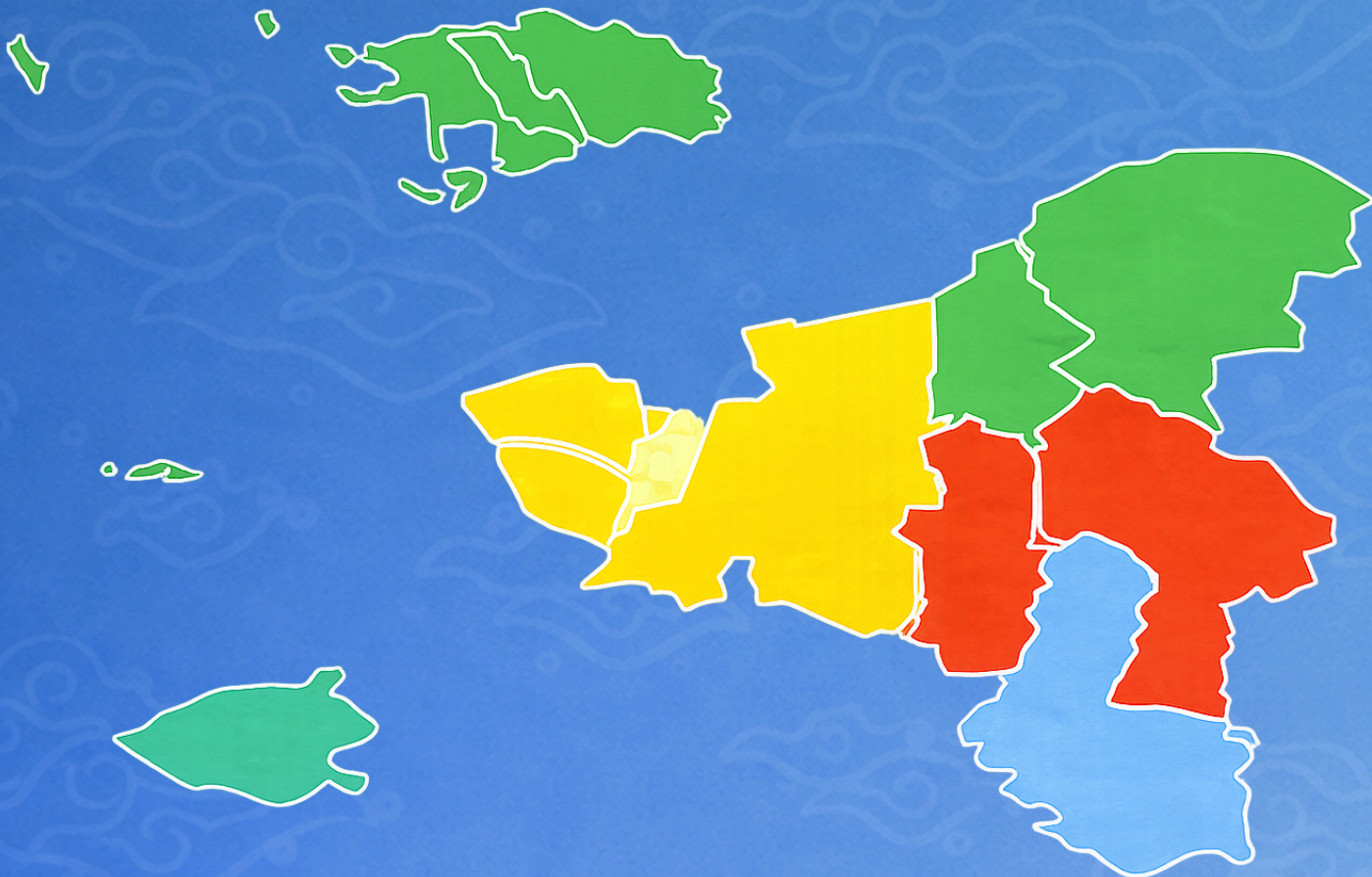


# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA PERIODE BULAN MEI 2026



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan Mei Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode Mei 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

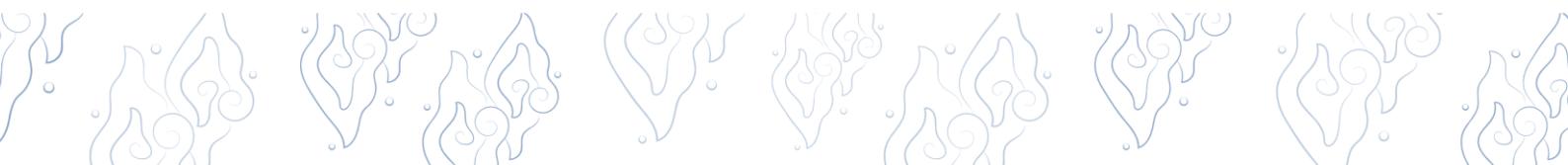
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

**Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1    Dasar Hukum (Landasan).....	4
1.2    Maksud dan Tujuan.....	5
1.3    Ruang Lingkup.....	5
BAB II KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA.....	7
2.1    Definisi BPP .....	7
2.2    Tugas BPP .....	7
2.3    Fungsi BPP.....	7
2.4    Struktur BPP .....	8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	9
3.1    Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat .....	9
3.2    Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas .....	27
3.3    Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif.....	40
3.4    Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai) .....	73
3.5    Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi).....	87
BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN .....	114
4.1    Capaian.....	114
4.2    Permasalahan.....	116
4.3    Tantangan .....	117
BAB V PENUTUP.....	120
5.1    Kesimpulan .....	120
5.2    Rekomendasi.....	121
5.3    Penutup.....	122

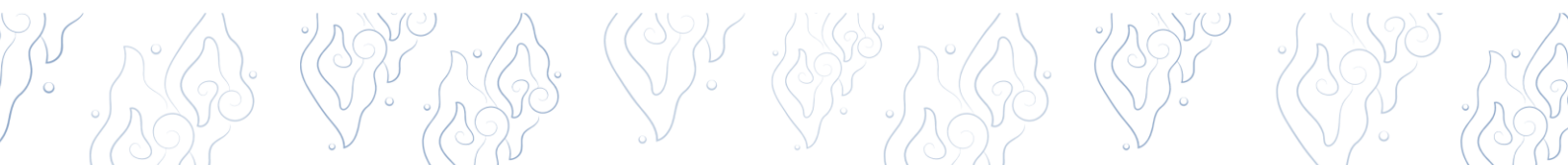


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Hukum (Landasan)

- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
  - 1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
  - 3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
  - 5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
  - 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
  - 3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Mei 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

### 2. Tujuan

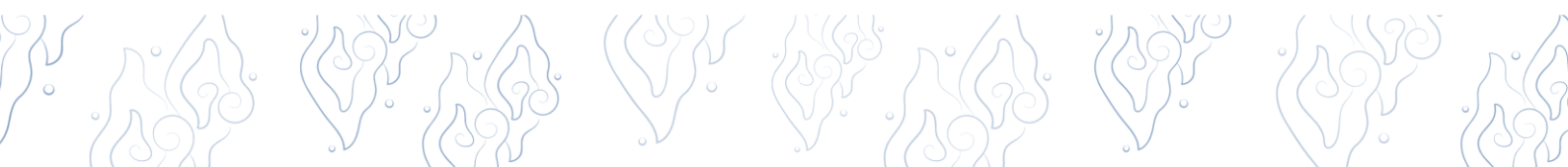
Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Mei 2026.
2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPP.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

## 1.3 Ruang Lingkup

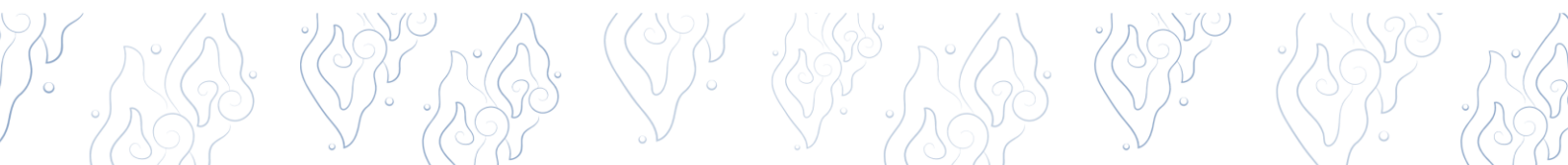
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Mei 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–31 Mei 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.



## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA**

#### **2.1 Definisi BPP**

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

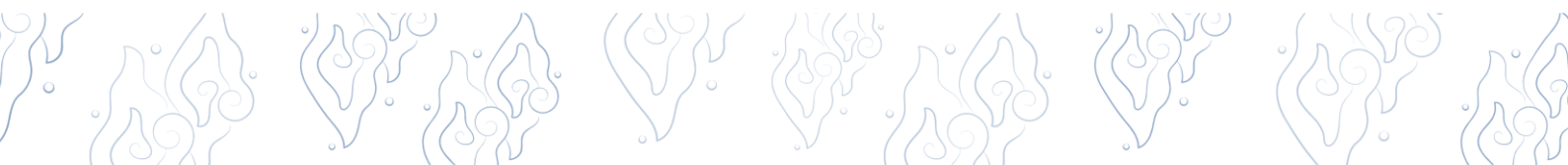
#### **2.2 Tugas BPP**

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.3 Fungsi BPP**

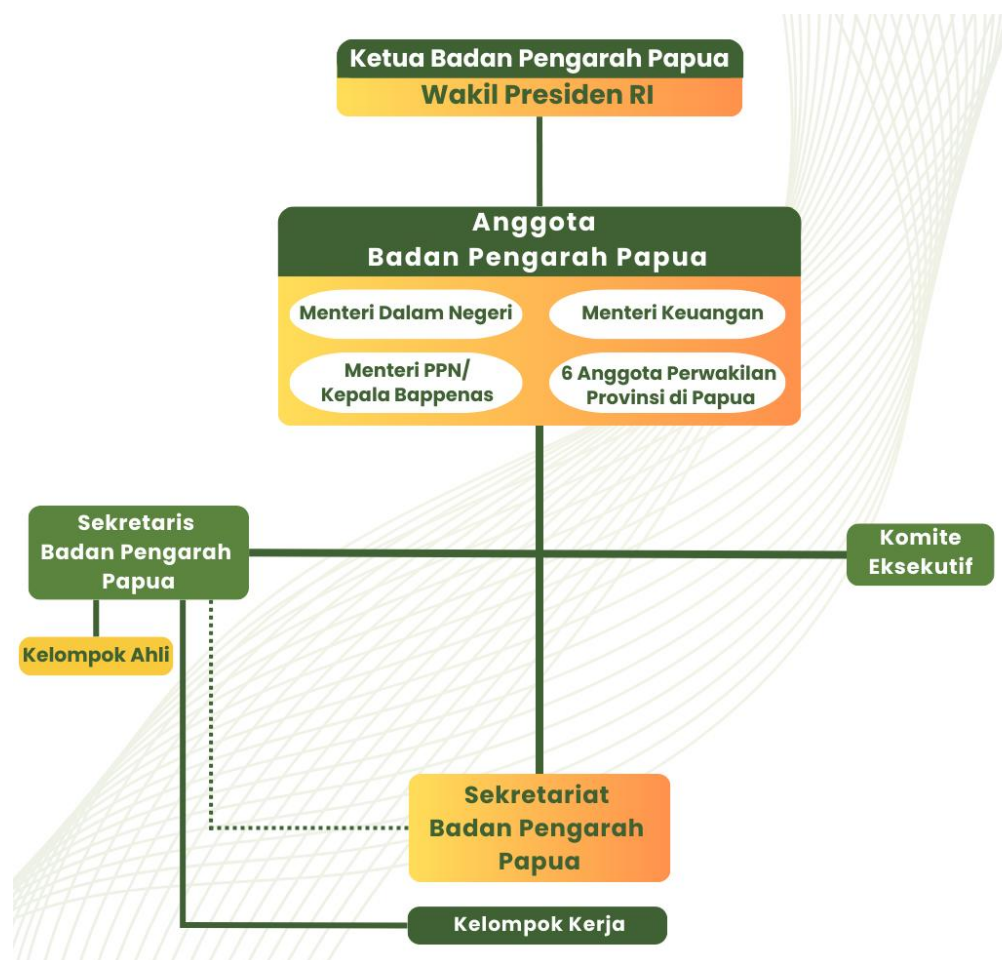
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan



- percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
  - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
  - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

## 2.4 Struktur BPP



## BAB III

### PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

##### Kegiatan 1

<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Penguatan Penanggulangan ATM: BPP Papua Barat Daya Audiensi bersama ADINKES & LSM Kesehatan Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin, 11 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks efektivitas pelaksanaan SHEK untuk percepatan pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Salah satu indikator dalam Misi Papua Sehat adalah peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), penurunan prevalensi stunting, serta eliminasi malaria. Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan, kompetensi, dan peran dalam penanganan berbagai faktor yang mempengaruhi capaian indikator kesehatan.</p> <p>Pada indikator Usia Harapan Hidup, salah satu penyebab utama kematian adalah penyakit infeksi menular, antara lain Tuberkulosis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Malaria yang saat ini dikolaborasikan dalam pendekatan ATM (AIDS, Tuberculosis, and Malaria). Dalam penanggulangan penyakit menular tersebut, pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh berbagai lembaga donor serta organisasi masyarakat sipil yang berperan aktif dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus ATM.</p>

<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan audiensi dari ADINKES dan Yayasan/LSM Kesehatan.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan ATM di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>3. Mendorong kolaborasi kegiatan antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan lembaga mitra dalam penanganan ATM.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES);</li> <li>2. Yayasan Sorong Sehati;</li> <li>3. Yayasan Papua Relief (YAPARI);</li> <li>4. Pokja Papua Sehat BPP PBD.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana keberlanjutan pembiayaan program ATM setelah berakhirnya dukungan dari Global Fund sebagai lembaga donor.</li> <li>2. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang mendukung penanganan kasus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya rekomendasi awal terkait penguatan penanggulangan ATM di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pelaporan dan tindak lanjut.</li> <li>3. Tersusunnya laporan hasil kegiatan.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<p>BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan memfasilitasi pelaksanaan Forum SHEK yang secara khusus membahas isu penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) guna memperkuat koordinasi, sinkronisasi program, serta keberlanjutan penanganan ATM di Provinsi Papua Barat Daya.</p>



## Kegiatan 2

<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Penguatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: BPP Papua Barat Daya Audiensi bersama Yayasan ASRI
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 12 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks efektivitas pelaksanaan SHEK untuk percepatan pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Kolaborasi di bidang kesehatan antara BPP Papua Barat Daya dan Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) telah terjalin selama kurang lebih dua tahun terakhir. Kerja sama yang dibangun berfokus pada upaya perlindungan lingkungan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat pemilik hak ulayat dan Orang Asli Papua (OAP).</p> <p>Seiring berjalannya waktu, kolaborasi tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam aspek pertukaran informasi, diskusi program, serta pelaksanaan kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat OAP, khususnya di wilayah Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya.</p>

<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan audiensi dari Yayasan ASRI.</li> <li>2. Melakukan sinkronisasi program kesehatan yang dilaksanakan oleh Yayasan ASRI dan para pemangku kepentingan terkait.</li> <li>3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan ASRI.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi dan peluang kolaborasi kegiatan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Yayasan ASRI;</li> <li>2. Pokja Papua Sehat BPP PBD.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil kegiatan pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan ASRI pada empat distrik di Kabupaten Tambrau.</li> <li>2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan ASRI memaparkan hasil tabulasi pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan pada empat distrik di Kabupaten Tambrau.</li> <li>2. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia pada sektor kesehatan.</li> <li>3. Disampaikan bahwa partisipasi dan inisiatif dari instansi teknis terkait, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan di lapangan, masih perlu ditingkatkan guna memperkuat keberlanjutan program dan kemandirian pelaksanaan kegiatan kesehatan di daerah.</li> </ol>

<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<p>Perlu dilaksanakan pertemuan dan forum kolaborasi yang lebih komprehensif antara pemerintah daerah, Yayasan ASRI, dan para pemangku kepentingan terkait guna memperkuat kerja sama bidang kesehatan yang sejalan dengan amanat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).</p>
<b>Dokumentasi</b>	

### Kegiatan 3

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD dalam Kegiatan Press Conference Local Media- For Ensuring Implementation Social Contractings (YAPARI)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu, 13 Mei 2026 di Kantor Dinas Kesehatan Kota Sorong
<b>IKU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks efektivitas pelaksanaan SHEK untuk percepatan pembangunan Papua</li> <li>• Indeks pelaksanaan publikasi program/kegiatan</li> </ul>
<b>Latar Belakang</b>	<p>Human Immunodeficiency Virus (HIV) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya yang memerlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Dalam rangka memperkuat implementasi program penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya, Yayasan Papua Relief (YAPARI) menyelenggarakan kegiatan Press Conference Local Media – For Ensuring Implementation Social Contracting yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga mitra, dan perangkat daerah terkait. BPP Papua Barat Daya turut berpartisipasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung penguatan program kesehatan di Tanah Papua.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi undangan sebagai Narasumber.</li> <li>2. Memperoleh informasi terkini mengenai situasi dan perkembangan kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendorong koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan HIV/AIDS.</li> <li>4. Mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan dukungan dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS.</li> <li>5. Mendukung sinkronisasi program penanganan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan mitra pembangunan.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Papua Relief (YAPARI);</li> <li>2. ADINKES;</li> <li>3. Yayasan Sorong Sehati;</li> <li>4. SANOMA;</li> <li>5. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kota Sorong;</li> <li>7. BAPPEDA;</li> <li>8. Dinas Pendidikan;</li> <li>9. Dinas Pemuda dan Olahraga;</li> <li>10. Perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;</li> <li>11. Pokja Papua Sehat BPP PBD.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situasi terkini perkembangan kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan HIV/AIDS.</li> <li>3. Peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga mitra dalam mendukung program penanggulangan HIV/AIDS.</li> <li>4. Dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program penanganan HIV/AIDS.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tantangan pelaksanaan program, termasuk aspek pembiayaan dan kondisi lapangan.</li> <li>6. Rencana tindak lanjut dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperoleh informasi mengenai perkembangan situasi HIV/AIDS serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Teridentifikasi berbagai tantangan pelaksanaan program, termasuk keterbatasan pembiayaan dan kendala operasional di lapangan.</li> <li>3. Terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan perangkat daerah lintas sektor untuk mendukung penanganan HIV/AIDS secara lebih terintegrasi.</li> <li>4. Disampaikannya arahan dan masukan dari Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya sebagai bahan penguatan koordinasi dan kolaborasi program ke depan.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<p>Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan guna memastikan keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS serta mendukung pencapaian target Misi Papua Sehat sebagaimana diamanatkan dalam RIPPP dan RAPPP.</p>
<b>Dokumentasi</b>	

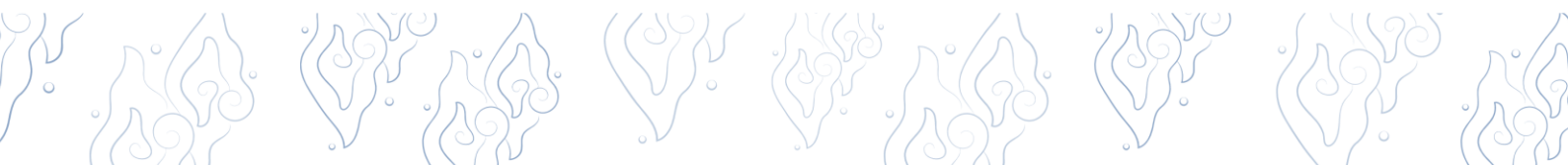


#### Kegiatan 4

<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Misi Papua Sehat: Penanganan HIV/AIDS serta ODGJ & NAPZA di Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin, 18 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks efektivitas pelaksanaan SHEK untuk percepatan pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Permasalahan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek kesehatan mental dan permasalahan sosial yang saling berkaitan. Berbagai kasus kesehatan yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya keterkaitan antara gangguan kesehatan mental, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta meningkatnya risiko penularan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.</p> <p>Salah satu faktor risiko penularan HIV/AIDS adalah penggunaan jarum suntik pada penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga memerlukan perhatian dan</p>

	dukungan lintas sektor karena berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperoleh informasi, melakukan koordinasi, serta memperkuat sinergi penanganan permasalahan tersebut, BPP Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan SHEK bersama Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terkait penanganan HIV/AIDS, ODGJ, dan NAPZA di Provinsi Papua Barat Daya.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya;</li> <li>2. Tim Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya;</li> <li>3. Tim Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya;</li> <li>4. Tim Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan penanganan ODGJ dan HIV/AIDS yang menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Kerja sama dan peran lembaga mitra dalam penanganan ODGJ, termasuk yayasan yang dikelola oleh Ibu Orpa Osok.</li> <li>3. Permasalahan sosial lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan penanganan ODGJ, HIV/AIDS, dan NAPZA di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Teridentifikasi kebutuhan penguatan koordinasi antara perangkat daerah, lembaga sosial, dan</li> </ol>

	<p>pemangku kepentingan terkait dalam penanganan ODGJ dan HIV/AIDS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terbangunnya pemahaman bersama mengenai keterkaitan isu kesehatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Misi Papua Sehat.</li> <li>4. Tersusunnya dokumentasi dan laporan hasil kegiatan sebagai bahan tindak lanjut.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>Perlu dilakukan penguatan kerja sama lintas sektor antara perangkat daerah, lembaga sosial, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanganan HIV/AIDS, ODGJ, dan NAPZA secara terpadu guna mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	 




## Kegiatan 5

<b>Nama Kegiatan</b>	Forum SHEK Misi Papua Sehat: Penguatan Penanggulangan AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM) di Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 26 Mei 2026 di Aula KPPN Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM) merupakan tiga penyakit menular yang masih menjadi tantangan utama pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya. Tingginya angka kasus, keterbatasan akses layanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, serta ketergantungan terhadap dukungan lembaga donor menjadi tantangan dalam upaya mencapai target eliminasi ATM tahun 2030. Oleh karena itu, BPP Papua Barat Daya melaksanakan Forum SHEK Misi Papua Sehat sebagai tindak lanjut dari pertemuan bersama Adinkes dan LSM yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat strategi penanggulangan ATM melalui keterlibatan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan SHEK terkait penguatan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pencapaian target eliminasi ATM tahun 2030.</li> <li>3. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan ATM.</li> </ol>

	4. Merumuskan rekomendasi dan langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan serta dukungan komunitas dalam penanganan ATM.
<b>Peserta Kegiatan</b>	Kegiatan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang ATM, akademisi, Bank Mandiri, organisasi profesi kesehatan, mitra pembangunan, serta BPP Papua Barat Daya.
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situasi terkini Tuberkulosis di Indonesia dan Papua Barat Daya serta tantangan pencapaian target eliminasi TB.</li> <li>2. Permasalahan pengobatan TB, termasuk kepatuhan pasien, ketersediaan obat, kapasitas SDM kesehatan, dan keterbatasan sarana diagnostik.</li> <li>3. Strategi percepatan eliminasi HIV/AIDS dan Malaria menuju tahun 2030.</li> <li>4. Peran pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi dan penguatan dukungan anggaran ATM.</li> <li>5. Tantangan penanggulangan ATM di daerah terpencil akibat kondisi geografis dan keterbatasan akses layanan kesehatan.</li> <li>6. Peran strategis LSM dalam edukasi masyarakat, pendampingan pasien, pengurangan stigma, pelacakan kasus, dan dukungan kepatuhan pengobatan.</li> <li>7. Validasi data ATM, penguatan surveilans, dan pentingnya monitoring serta evaluasi secara berkala.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Penguatan layanan kesehatan primer melalui puskesmas dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.</li> <li>9. Strategi keberlanjutan program ATM pasca berakhirnya dukungan lembaga donor.</li> <li>10. Dukungan sektor perbankan dan dunia usaha dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, termasuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV).</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasi berbagai tantangan utama penanggulangan ATM di Papua Barat Daya, antara lain keterbatasan SDM kesehatan, sarana diagnostik, dukungan pembiayaan daerah, akses layanan kesehatan, dan validitas data ATM.</li> <li>2. Diperoleh masukan bahwa penguatan layanan kesehatan primer melalui puskesmas menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian target eliminasi ATM.</li> <li>3. Terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan LSM untuk memperkuat kolaborasi dalam penemuan kasus, pendampingan pasien, serta peningkatan kepatuhan pengobatan.</li> <li>4. Mengemukakan kebutuhan percepatan regulasi daerah terkait ATM sebagai dasar penganggaran dan penguatan program lintas sektor.</li> <li>5. Diperoleh rekomendasi perlunya monitoring dan evaluasi ATM secara berkala pada tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota.</li> <li>6. Teridentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan dalam mendukung penanggulangan ATM berbasis komunitas.</li> </ol>

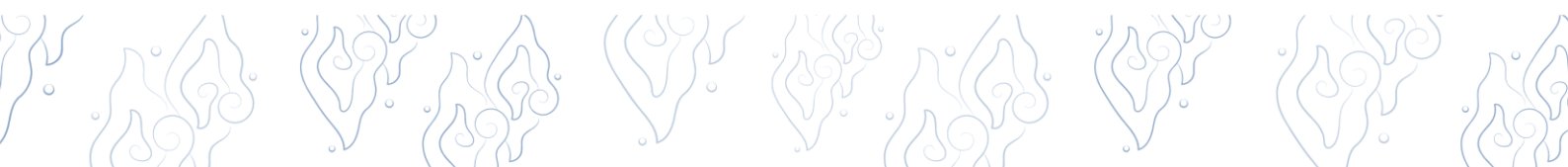


	<p>7. Mengemuka kebutuhan strategi keberlanjutan program ATM pasca berakhirnya dukungan lembaga donor internasional.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat penyusunan dan penetapan regulasi daerah terkait penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.</li> <li>2. Melaksanakan validasi data ATM secara berkala dan memperkuat sistem surveilans penyakit.</li> <li>3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi ATM tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Memperkuat kapasitas SDM kesehatan, kader, dan petugas lapangan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.</li> <li>5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, LSM, dunia usaha, dan mitra pembangunan.</li> <li>6. Mendorong peningkatan dukungan pembiayaan daerah untuk menjamin keberlanjutan program ATM pasca berakhirnya dukungan donor.</li> <li>7. Mengoptimalkan peran puskesmas sebagai ujung tombak layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanggulangan ATM.</li> <li>8. Mengembangkan model dukungan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan, termasuk ODHIV, melalui kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	

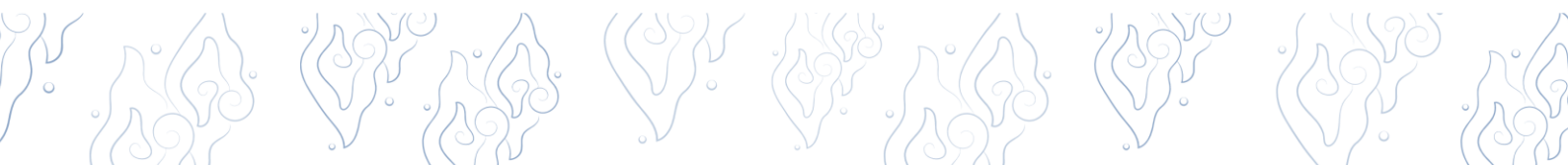


### Kegiatan 6


<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Aktif BPP PBD dalam Kegiatan Expo Pembangunan Daerah &amp; Kesehatan serta Gerakan Nasional Pemberantasan TB Berbasis Komunitas melalui Penguatan Higiene Sanitasi &amp; Akselerasi QC SPPG dalam Program MBG</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Peran Aktif BPP PBD dalam Kegiatan Expo Pembangunan Daerah &amp; Kesehatan serta Gerakan Nasional Pemberantasan TB Berbasis Komunitas melalui Penguatan Higiene Sanitasi &amp; Akselerasi QC SPPG dalam Program MBG</p>
<p><b>IKU</b></p>	<p>Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis (TB) Berbasis Komunitas melalui Penguatan Higiene Sanitasi</p>



	<p>dan Akselerasi Quality Control Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), dan Pemerintah Kota Sorong.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan memperkuat upaya eliminasi TB berbasis komunitas, meningkatkan kualitas higiene dan sanitasi lingkungan, serta mendukung pengawasan mutu layanan pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua. Mengingat keterkaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia, BPP Papua Barat Daya turut berpartisipasi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Misi Papua Sehat dan Papua Produktif.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan</b> (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri kegiatan Gerakan Nasional Pemberantasan TB Berbasis Komunitas melalui Penguatan Higiene Sanitasi dan Akselerasi Quality Control SPPG dalam Program MBG.</li> <li>2. Berpartisipasi dalam penandatanganan deklarasi dukungan terhadap Gerakan Nasional Pemberantasan TB Berbasis Komunitas melalui Penguatan Higiene Sanitasi dan Akselerasi Quality Control SPPG dalam Program MBG.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (daring);</li> <li>2. Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI);</li> <li>3. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);</li> <li>4. Pemerintah Kota Sorong;</li> <li>5. Pemerintah Daerah se-Tanah Papua;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat;</li> <li>7. Akademisi;</li> <li>8. BPP Papua Barat Daya (Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Produktif).</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Partisipasi dan dukungan terhadap deklarasi bersama serta penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situasi dan tantangan penanganan Tuberkulosis (TB) di Tanah Papua.</li> <li>2. Dampak penyakit TB terhadap kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).</li> <li>3. Penguatan higiene dan sanitasi sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit menular.</li> <li>4. Dukungan lintas sektor dalam percepatan eliminasi TB berbasis komunitas.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penandatanganan Deklarasi Dukungan terhadap Gerakan Nasional Pemberantasan TB Berbasis Komunitas melalui Penguatan Higiene Sanitasi dan Akselerasi Quality Control SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis.</li> <li>2. Terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, organisasi profesi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan eliminasi TB di Tanah Papua.</li> <li>3. Meningkatnya pemahaman bersama mengenai keterkaitan antara pengendalian TB, kualitas sanitasi, dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	Perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi daerah yang terintegrasi serta dukungan penganggaran

	yang memadai dan rasional dalam APBD guna mendukung pelaksanaan program eliminasi TB, penguatan higiene sanitasi, dan peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi di Provinsi Papua Barat Daya.
<b>Dokumentasi</b>	

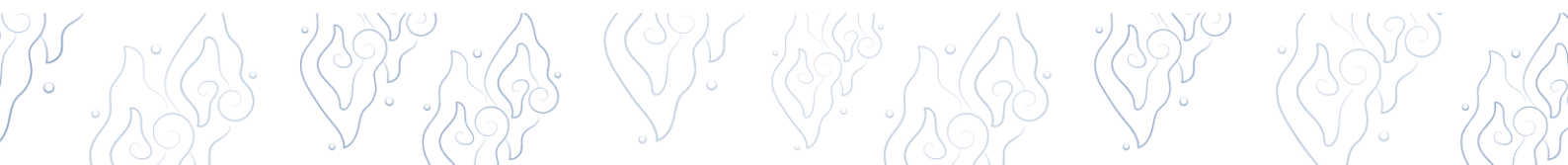
### 3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

#### Kegiatan 1

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran serta BPP PBD dalam Kegiatan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Sabtu, 2 Mei 2026 di Lapangan Apel Kantor Gubernur Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Peringatan Hardiknas Tahun 2026 Tingkat Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Papua Barat Daya dengan Gubernur Papua Barat Daya bertindak sebagai Inspektur Upacara.

	Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Hadir dan mendampingi Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 Tingkat Provinsi Papua Barat Daya.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya;</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya beserta jajaran;</li> <li>3. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Pokja Papua Cerdas);</li> <li>4. Perwakilan Perguruan Tinggi di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong;</li> <li>5. Perwakilan satuan pendidikan SLB (SD–SMA) Kota Sorong dan Kabupaten Sorong;</li> <li>6. Perwakilan SD, SMP, SMA/SMK di Kota Sorong;</li> <li>7. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Cerdas
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 sesuai pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.</li> <li>2. Penyampaian Sambutan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026.</li> </ol>

	<p>3. Pembacaan sambutan Presiden Republik Indonesia oleh Gubernur Papua Barat Daya selaku Inspektur Upacara.</p>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<p>Beberapa poin penting yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya implementasi program-program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara optimal di daerah.</li> <li>2. Komitmen pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh peserta didik hingga ke wilayah pelosok sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak.</li> <li>3. Penguatan implementasi program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.</li> </ol> <p>Kegiatan Upacara Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 ditutup dengan pembacaan puisi oleh peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota Sorong.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta perangkat daerah terkait diharapkan dapat mengembangkan berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi aktif peserta didik, meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui berbagai kompetisi, program pengembangan bakat, dan kegiatan pendidikan lainnya di Provinsi Papua Barat Daya.</p>

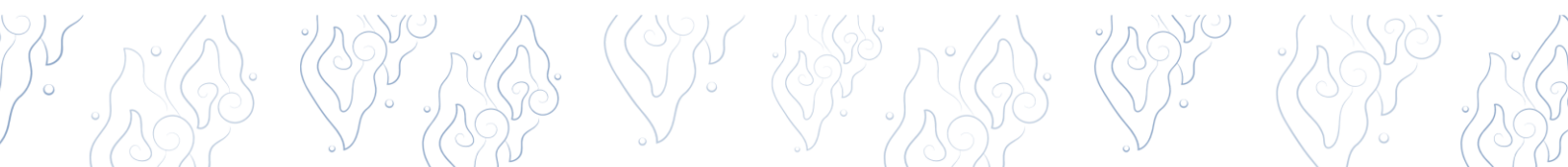


## Dokumentasi



## Kegiatan 2

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Implementasi Sekolah Sepanjang Hari di Wilayah Papua
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu, 13 Mei 2026 melalui Daring/Zoom Meetings
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan
<b>Latar Belakang</b>	Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) merupakan salah satu Program Percepatan Misi Papua Cerdas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Aksi



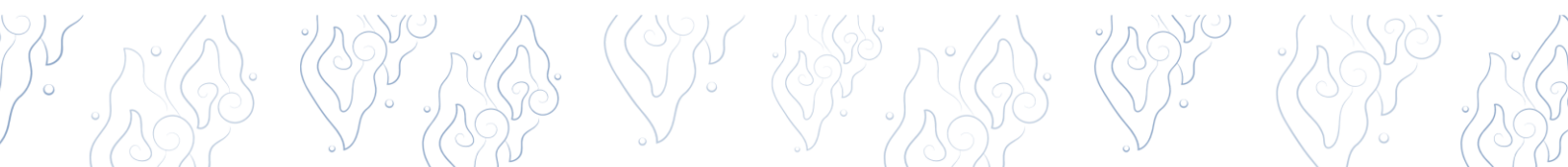
	<p>Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029. Dalam rangka memastikan kesamaan persepsi, pendekatan, dan pola implementasi program di seluruh wilayah Papua, Bappenas RI memandang perlu dilaksanakan konsolidasi dan harmonisasi model pelaksanaan SSH yang telah berjalan pada beberapa daerah percontohan.</p> <p>Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari daerah yang telah mengimplementasikan SSH, sekaligus menjadi forum pembelajaran bersama dalam rangka penyusunan model pelaksanaan SSH yang dapat direplikasi di seluruh provinsi di Tanah Papua guna mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan</b> (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<p>Mempresentasikan model pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang telah diterapkan di Kabupaten Sorong Selatan sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam penyusunan model implementasi SSH di wilayah Papua.</p>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pembangunan Wilayah III Maluku dan Papua Bappenas RI;</li> <li>2. Dinas Pendidikan Provinsi se-Tanah Papua;</li> <li>3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan;</li> <li>4. Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai;</li> <li>5. Bapperida Provinsi se-Tanah Papua;</li> <li>6. BPP PBD (Pokja Papua Cerdas);</li> <li>7. Tim Ahli SSH Universitas Papua (UNIPA);</li> <li>8. Pemangku kepentingan terkait lainnya.</li> </ol>
<p><b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b></p>	<p>Harmonisasi</p>
<p><b>Misi/Keterangan</b></p>	<p>Papua Cerdas</p>

<p><b>Poin-Poin Pembahasan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan Kepala Daerah se-Tanah Papua di Timika, Provinsi Papua Tengah.</li> <li>2. Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai salah satu model percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua.</li> <li>3. Presentasi model implementasi SSH yang telah berjalan di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Paniai, dan beberapa wilayah lainnya.</li> <li>4. Penyusunan desain dan model pelaksanaan SSH yang akan dikembangkan secara lebih luas di Tanah Papua.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model SSH yang diterapkan di Kabupaten Sorong Selatan dinilai lebih terukur dan memiliki dampak yang dapat dievaluasi melalui peningkatan capaian rapor pendidikan serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, sehingga berpotensi menjadi salah satu model yang dapat direplikasi di wilayah Papua lainnya.</li> <li>2. Pelaksanaan SSH di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan program. Model ini telah berkembang pada tiga lokus dan direncanakan akan diperluas ke wilayah Imekko pada tahun 2027.</li> <li>3. Pelaksanaan SSH di beberapa wilayah lain, termasuk Papua Tengah dan Papua Selatan, masih berada pada tahap implementasi sehingga efektivitas dan dampaknya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh.</li> <li>4. SSH tidak hanya berfokus pada penyediaan makan dan minum bagi peserta didik, tetapi merupakan model pendidikan inklusif yang bertujuan</li> </ol>

	meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), menekan Angka Tidak Sekolah (ATS), serta meningkatkan kemampuan life skill dan soft skill peserta didik.
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	Perlu dilaksanakan kegiatan SHEK bersama Universitas Papua (UNIPA), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyamaan persepsi dan penyusunan model implementasi Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang dapat dikembangkan di Provinsi Papua Barat Daya maupun wilayah Papua secara lebih luas.
<b>Dokumentasi</b>	-

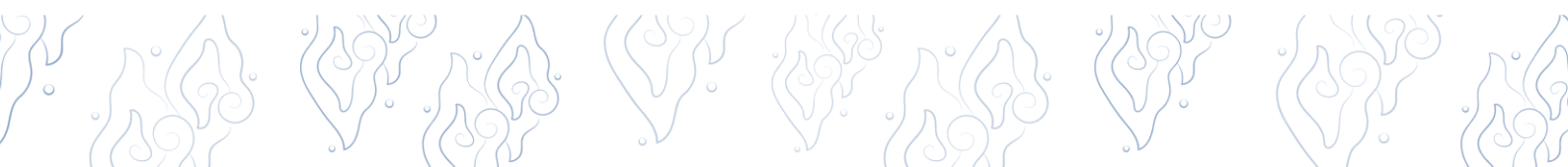
### Kegiatan 3

<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Misi Papua Cerdas: Revitalisasi & Pengembangan Pendidikan Vokasi di Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 19 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Revitalisasi pendidikan vokasi merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua melalui penyediaan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi unggulan daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Papua Cerdas, BPP Papua Barat Daya mendorong percepatan revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi melalui rencana pengembangan dan pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Sorong Selatan.



	Menindaklanjuti agenda tersebut, BPP Papua Barat Daya mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana kerja revitalisasi pendidikan vokasi dan persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Sorong Selatan.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka revitalisasi dan pengembangan pendidikan vokasi melalui persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Sorong Selatan.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>3. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>4. Staf Bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>5. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Cerdas
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan program revitalisasi pendidikan vokasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.</li> <li>2. Perencanaan dan tahapan pengembangan program revitalisasi pendidikan vokasi pada Tahun 2027.</li> <li>3. Persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Sorong Selatan.</li> </ol>

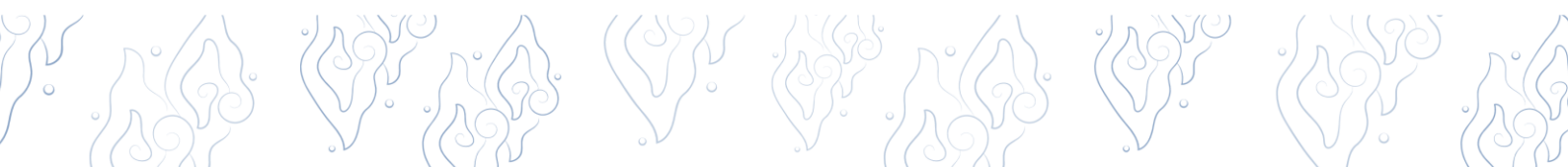
	<p>4. Tindak lanjut hasil pendampingan dan SHEK yang telah dilaksanakan BPP Papua Barat Daya sejak Tahun 2025.</p> <p>Dalam diskusi juga disampaikan bahwa BPP Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas telah melakukan berbagai kegiatan pendampingan dan SHEK, antara lain koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, peninjauan aset yang tersedia, koordinasi dengan sumber daya manusia eks Akademi Komunitas di Sorong Selatan, koordinasi dengan Universitas Papua (UNIPA) sebagai perguruan tinggi pembina yang diusulkan, serta koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.</p>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Tahun 2026 direncanakan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait aset dan kesiapan daerah, serta koordinasi bersama Universitas Papua terkait pembaruan data dan informasi program studi yang akan dikembangkan.</li> <li>2. Diperlukan pembentukan tim atau kelompok kerja yang bertugas menyusun dan memperbarui dokumen persiapan pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Sorong Selatan.</li> <li>3. Diperlukan pelaksanaan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BPP Papua Barat Daya untuk menyampaikan perkembangan serta mempresentasikan konsep dan desain pengembangan Akademi Komunitas di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna memperoleh</li> </ol>



	<p>dukungan dan kesepahaman terhadap rencana pengembangan Akademi Komunitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Universitas Papua (UNIPA) sebagai perguruan tinggi pembina terkait penyusunan dokumen pendirian dan pembaruan informasi program studi.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan SHEK bersama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait pemanfaatan aset Akademi Komunitas dan persiapan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2027.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	

#### Kegiatan 4

<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Serta BPP PBD dalam Kegiatan Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 dan</p>
-----------------------------	---



	Penyerahan Bantuan Revitalisasi Tahun 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 26 Mei 2026 di SMK Negeri 1 Kota Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan berkualitas.</p> <p>Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melaksanakan peresmian hasil revitalisasi satuan pendidikan Tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan revitalisasi Tahun 2026 kepada satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Melaksanakan fungsi koordinasi dan dukungan terhadap implementasi program prioritas pembangunan pendidikan melalui kehadiran BPP Papua Barat Daya pada kegiatan peresmian revitalisasi satuan pendidikan dan penyerahan bantuan revitalisasi Tahun 2026.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia beserta Pembina Dharma Wanita Persatuan;</li> <li>2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;</li> <li>3. Gubernur Papua Barat Daya;</li> <li>4. Wali Kota Sorong;</li> <li>5. Pemerintah Kabupaten Sorong;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong;</li> <li>7. Kepala Sekolah penerima bantuan revitalisasi Tahun 2025 dan Tahun 2026;</li> <li>8. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>9. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat;</li> <li>10. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Papua Barat.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Menghadiri undangan dan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sektor pendidikan.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Cerdas
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peresmian hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025.</li> <li>2. Penyerahan bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.</li> <li>3. Arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia terkait percepatan pembangunan pendidikan.</li> <li>4. Dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meresmikan hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 dan menyerahkan bantuan revitalisasi Tahun 2026 kepada satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Kabupaten Sorong tercatat sebagai daerah penerima bantuan revitalisasi terbesar di Provinsi Papua Barat Daya dengan nilai bantuan mencapai sekitar Rp33 miliar, sedangkan Kota Sorong menerima bantuan sekitar Rp6 miliar.</li> </ol>

	<p>3. Disampaikan bahwa penetapan penerima bantuan revitalisasi dilakukan melalui mekanisme dan sistem yang terintegrasi pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.</p> <p>4. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan kualitas dan validitas data pendidikan, khususnya melalui pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akurat dan mutakhir.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>Perlu dilakukan koordinasi, berbagi praktik baik (best practices), serta forum diskusi atau workshop antar pemerintah daerah dan satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya guna meningkatkan kapasitas pengelolaan data pendidikan dan memperkuat strategi dalam memperoleh dukungan program revitalisasi pendidikan pada tahun-tahun mendatang.</p>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	 <p>The top photograph captures a formal event where a man in a white shirt and glasses is speaking at a blue podium. Behind him is a large blue banner with the text 'PERESMIAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA SORONG' and 'OLEH MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Abdul Wahid'. The bottom photograph shows a group of approximately 15 people, including officials and staff, standing in front of a building with a blue sign that reads 'SMK NEGERI 1 KOTA SORONG PAPUA BARAT'. They are holding black certificates or diplomas, and the scene is decorated with red and white bunting.</p>



### 3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif

#### Kegiatan 1

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD dalam Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Pendaftaran Penduduk Tingkat Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Jum'at, 8 Mei 2026 di ACC Hotel Aimas, Kabupaten Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Pendataan Orang Asli Papua (OAP) Terpilah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua, khususnya dalam memastikan program, kebijakan, dan pelayanan pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat Orang Asli Papua. Ketersediaan data yang valid dan terintegrasi menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p>Dalam rangka memperoleh gambaran perkembangan pelaksanaan pendataan OAP terpilah serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan</p>

	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat provinsi yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) melalui kehadiran dan partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk Tingkat Provinsi Papua Barat Daya.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya beserta jajaran;</li> <li>2. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>3. Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua Barat Daya;</li> <li>4. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Pokja Papua Cerdas dan Pokja Papua Produktif);</li> <li>5. Akademisi perguruan tinggi di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong;</li> <li>6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan tokoh perempuan.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan dan arahan dari Kepala Dinas PMK dan Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Pemaparan hasil pendataan Data OAP Terpilah Tahun 2025.</li> <li>3. Tanggapan dan masukan dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing.</li> </ol>

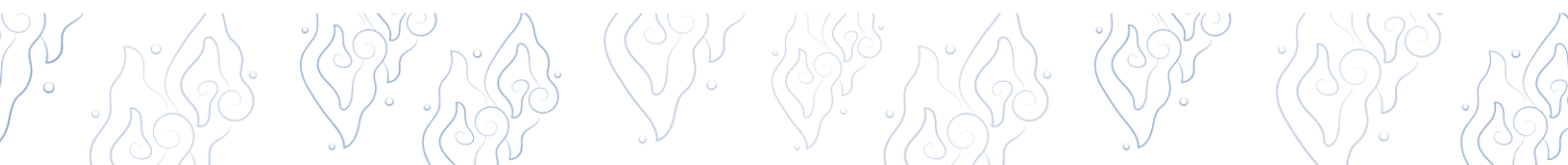
	<p>4. Tantangan dan strategi peningkatan kualitas data kependudukan OAP di Provinsi Papua Barat Daya.</p>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya telah merilis hasil sementara pendataan OAP Terpilah Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya penyediaan data dasar pembangunan di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Hasil pendataan menunjukkan adanya distribusi penduduk non-OAP yang cukup tinggi dan tersebar pada beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Maybrat, Tambrau, dan Sorong Selatan, selain Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.</li> <li>3. Disampaikan bahwa hasil pendataan yang dirilis masih bersifat sementara dan akan terus dilakukan pemutakhiran hingga target finalisasi data pada Tahun 2027.</li> <li>4. Ditemukan adanya perbedaan antara hasil pendataan yang dirilis sebesar 627.406 jiwa dengan jumlah penduduk Papua Barat Daya berdasarkan data kependudukan yang tercatat sebesar 614.415 jiwa, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas data.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<p>Perlu disusun desain dan mekanisme pelaksanaan rapat koordinasi yang lebih terstruktur, termasuk penguatan proses validasi data, sinkronisasi antar instansi, serta penyepakatan metodologi pendataan guna menghasilkan Data OAP Terpilah yang lebih akurat, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.</p>
<b>Dokumentasi</b>	-

## Kegiatan 2

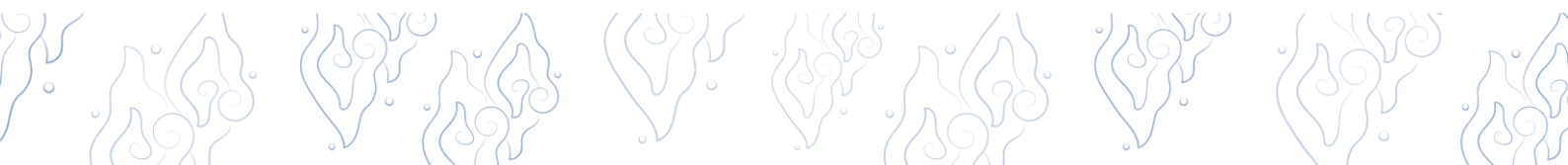
<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Penguatan Konektivitas Wilayah: BPP Papua Barat Daya Audiensi bersama Kepala Distrik di Papua Barat Daya (Klawak-Klabot-Buk-Seremuk)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin, 11 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Pemerintahan distrik memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Distrik juga menjadi penggerak pembangunan wilayah, khususnya dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan program pembangunan daerah.</p> <p>Wilayah Klabra Raya yang meliputi Distrik Klawak, Klabot, Hobard, dan Buk di Kabupaten Sorong serta Distrik Seremuk di Kabupaten Sorong Selatan masih menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan konektivitas akibat kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai, sehingga berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.</p> <p>Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kewenangan distrik dalam pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas pendataan Orang Asli Papua (OAP) di tingkat distrik. Dalam rangka menghimpun aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan wilayah, BPP Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Produktif melaksanakan audiensi bersama para kepala distrik guna menyusun langkah tindak lanjut yang dapat</p>

	didorong kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan audiensi.</li> <li>2. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Klabra Raya.</li> <li>3. Menghimpun aspirasi kepala distrik terkait peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.</li> <li>4. Membahas pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah daerah kepada distrik sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Melakukan validasi dan koordinasi terkait pendataan Orang Asli Papua (OAP) di tingkat distrik.</li> <li>6. Menyusun langkah bersama dalam memperjuangkan usulan prioritas pembangunan wilayah.</li> <li>7. Menerima kunjungan dan melaksanakan koordinasi SHEK bersama para kepala distrik.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Distrik Klabot;</li> <li>2. Kepala Distrik Klawak;</li> <li>3. Kepala Distrik Hobard;</li> <li>4. Kepala Distrik Buk;</li> <li>5. Kepala Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan;</li> <li>6. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya;</li> <li>7. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif – Prasyarat (Kondisi Perlu)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan peningkatan ruas jalan Batu Payung–Klawak–Klabot–Buk–Seremuk.</li> <li>2. Kondisi sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera.</li> <li>3. Kendala pelayanan kesehatan akibat keterbatasan akses transportasi.</li> </ol>

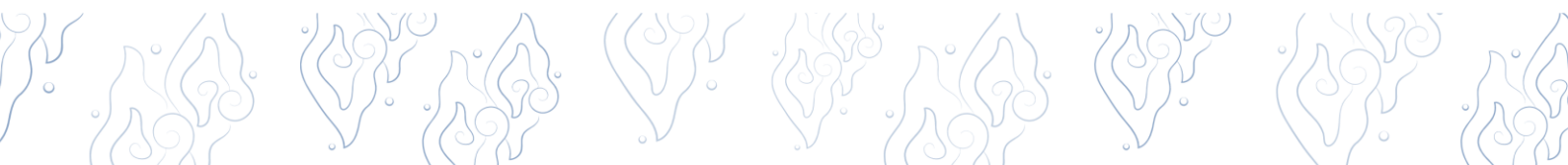
	<p>4. Usulan pelimpahan 45 bagian kewenangan pemerintah daerah kepada distrik.</p> <p>5. Validasi dan akurasi data Orang Asli Papua (OAP).</p> <p>6. Usulan relokasi Puskesmas Klawak sesuai aspirasi masyarakat.</p> <p>7. Pengawasan usulan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan kepada pemerintah provinsi dan Balai Jalan dan Jembatan.</p> <p>8. Penguatan pemahaman mengenai paradigma pembangunan Otonomi Khusus yang berfokus pada pelayanan dasar masyarakat.</p> <p>9. Penyampaian proposal dan usulan pelaksanaan SHEK bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar pada wilayah perbatasan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.</p> <p>Usulan prioritas yang disampaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses jalan provinsi yang menghubungkan Distrik Hobard, Distrik Buk, hingga Distrik Seremuk;</li> <li>• Penguatan layanan kesehatan, khususnya akses rujukan masyarakat Distrik Buk ke wilayah Sausapor dan sekitarnya;</li> <li>• Perbaikan sejumlah jembatan pada wilayah Distrik Seremuk yang mengalami kerusakan.</li> </ul> <p>Disampaikan pula bahwa berbagai usulan tersebut telah diajukan melalui mekanisme Musrenbang Kampung hingga Musrenbang Kabupaten.</p>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<p>1. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui OPD teknis terkait, telah direncanakan penanganan ruas jalan Batu Payung–Distrik Buk hingga Seremuk sepanjang</p>



	<p>kurang lebih 80 km. Namun demikian, diperlukan verifikasi teknis lebih lanjut karena panjang efektif ruas jalan diperkirakan sekitar 60 km.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Teridentifikasi perlunya penguatan koordinasi lintas OPD di tingkat kabupaten guna memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administratif.</li><li>3. Diperoleh informasi bahwa keterbatasan aksesibilitas wilayah turut berdampak terhadap akses pendidikan menengah dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah.</li><li>4. Pembangunan dan perbaikan jembatan di Distrik Seremuk dipandang perlu menjadi prioritas daerah mengingat perannya dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata Sungai Klaogin.</li><li>5. Kepala distrik menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas wilayah dan pelayanan masyarakat.</li><li>6. Diperoleh informasi mengenai sejumlah ruas jalan dan jembatan yang memerlukan penanganan segera.</li><li>7. Pokja Papua Produktif menyampaikan bahwa usulan pembangunan ruas jalan Klawak–Klabot telah masuk dalam prioritas pembangunan daerah dan telah diusulkan pada Musrenbang Provinsi untuk Tahun Anggaran 2027.</li><li>8. Disepakati perlunya koordinasi lanjutan dengan Balai Jalan dan Jembatan Papua Barat dan Papua Barat Daya.</li><li>9. Terdapat kebutuhan untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) di tingkat distrik.</li></ol>
--	---



	<p>10. Aspirasi terkait pelimpahan kewenangan kepada distrik akan terus didorong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawal usulan pembangunan jalan dan jembatan melalui koordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan Balai Jalan dan Jembatan.</li> <li>2. Meminta pemerintah distrik menyampaikan data kerusakan jembatan secara rinci sebagai bahan penyusunan usulan pembangunan.</li> <li>3. Melaksanakan pertemuan lanjutan dengan Balai Jalan dan Jembatan guna membahas dukungan pembangunan infrastruktur wilayah Klabra Raya.</li> <li>4. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait validasi dan akurasi data OAP.</li> <li>5. Mendorong percepatan pelimpahan kewenangan kepada distrik guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.</li> <li>6. Mengawal usulan relokasi dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.</li> <li>7. Mendorong koordinasi dan evaluasi perencanaan bersama OPD teknis tingkat kabupaten dan provinsi terhadap seluruh usulan program prioritas yang telah disampaikan.</li> <li>8. Menyampaikan hasil SHEK kepada masing-masing kepala distrik sebagai bahan tindak lanjut dan pengawalan bersama.</li> </ol>



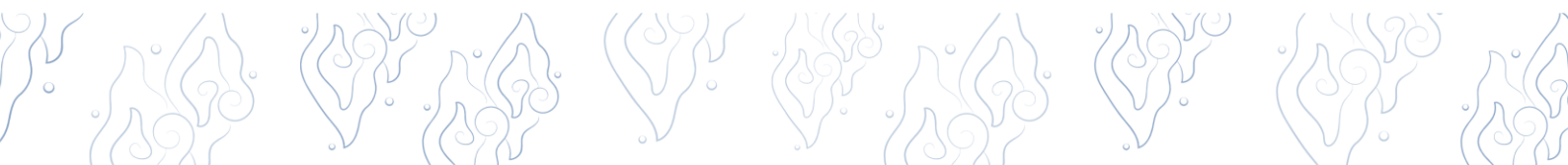
## Dokumentasi



## Kegiatan 3

**Nama Kegiatan**

Penerimaan Audiensi & Dialog bersama LSM YP4P (Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Papua)



<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 19 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya membuka ruang dialog dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan dan Otonomi Khusus di Tanah Papua.</p> <p>Dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat, Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Papua (YP4P) mengajukan permohonan audiensi kepada BPP Papua Barat Daya. Audiensi ini dilaksanakan sebagai wadah penyampaian informasi, masukan, dan berbagai temuan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya yang ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP).</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menghimpun aspirasi yang disampaikan oleh Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Papua (YP4P).</li> <li>2. Memperoleh informasi dan masukan terkait pelaksanaan program pembangunan yang menasar masyarakat Orang Asli Papua (OAP).</li> <li>3. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.</li> </ol>

	4. Memperkuat koordinasi antara BPP dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.
<b>Peserta Kegiatan</b>	1. Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Papua (YP4P); 2. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya; 3. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya.
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	1. Penyampaian aspirasi dan masukan dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Papua (YP4P). 2. Dugaan adanya program pemerintah daerah yang belum sepenuhnya tepat sasaran dalam menjangkau masyarakat Orang Asli Papua (OAP). 3. Tantangan pelaksanaan program pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat OAP. 4. Pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan validasi data penerima manfaat program pembangunan. 5. Peran masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.
<b>Hasil Kegiatan</b>	1. BPP Papua Barat Daya menerima dan menghimpun berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Papua (YP4P). 2. Diperoleh informasi mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran pada beberapa program pemerintah daerah yang ditujukan kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Teridentifikasi perlunya penguatan mekanisme verifikasi, validasi data penerima manfaat, dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan.</li> <li>4. Terbangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara BPP Papua Barat Daya dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh YP4P.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait untuk memperoleh klarifikasi dan data pendukung terhadap isu yang disampaikan.</li> <li>3. Mendorong penguatan mekanisme pengawasan, verifikasi, dan validasi penerima manfaat program pembangunan yang menysasar masyarakat Orang Asli Papua.</li> <li>4. Menjadikan hasil audiensi sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi SHEK dan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	

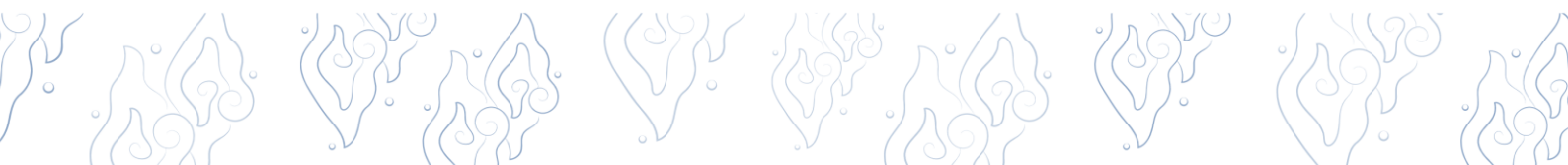


#### Kegiatan 4

<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Misi Papua Produktif: Penguatan Impor-Ekspor & Pengembangan Ekonomi Strategis di Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu, 20 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Provinsi Papua Barat Daya memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengembangan sektor ekspor masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait konektivitas, distribusi logistik, serta keterbatasan sarana transportasi yang mendukung arus barang keluar dari wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Papua Produktif serta memperkuat pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, BPP Papua Barat</p>

	<p>Daya melalui Pokja Papua Produktif melaksanakan kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) bersama Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Papua untuk membahas penguatan kegiatan impor-ekspor dan pengembangan ekonomi strategis di Provinsi Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi potensi komoditas unggulan yang memiliki peluang ekspor dari Papua Barat Daya.</li> <li>2. Menghimpun informasi terkait tantangan dan hambatan kegiatan ekspor daerah.</li> <li>3. Memperkuat koordinasi antara BPP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.</li> <li>4. Mendorong sinergi lintas sektor dalam penguatan rantai pasok dan distribusi komoditas ekspor.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya;</li> <li>2. Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Papua;</li> </ol>
<p><b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b></p>	<p>SHEK</p>
<p><b>Misi/Keterangan</b></p>	<p>Papua Produktif</p>
<p><b>Poin-Poin Pembahasan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi pengembangan komoditas unggulan ekspor di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Peluang peningkatan ekspor hasil perikanan dan perkebunan.</li> <li>3. Tantangan distribusi logistik dan keterbatasan kapasitas angkut barang.</li> <li>4. Dukungan kebijakan dan fasilitasi ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>5. Strategi penguatan konektivitas dan rantai pasok komoditas unggulan daerah.</li> </ol>

<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasi sejumlah komoditas unggulan Papua Barat Daya yang memiliki peluang ekspor, antara lain ikan tuna dari Kabupaten Tambrau, udang dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, serta kelapa dalam dari Kabupaten Tambrau, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.</li> <li>2. Diperoleh informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekspor daerah, khususnya keterbatasan kapasitas kargo pesawat dan kapal yang mempengaruhi distribusi serta peningkatan volume ekspor.</li> <li>3. Terbangun koordinasi awal antara BPP Papua Barat Daya dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi unggulan daerah.</li> <li>4. Teridentifikasi kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung pengembangan sistem logistik dan distribusi komoditas ekspor di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan SHEK lanjutan yang melibatkan OPD teknis terkait, pelaku usaha ekspor, serta penyedia jasa transportasi udara dan laut.</li> <li>2. Mendorong penyusunan langkah bersama dalam mengatasi hambatan distribusi dan konektivitas logistik ekspor.</li> <li>3. Memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan Papua Barat Daya.</li> <li>4. Mengidentifikasi peluang pengembangan komoditas ekspor baru yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.</li> </ol>

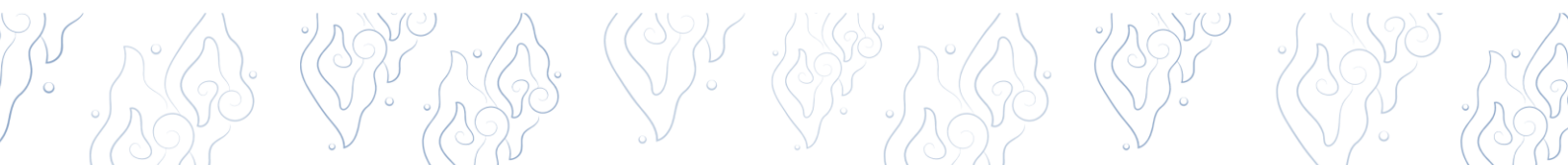


## Dokumentasi

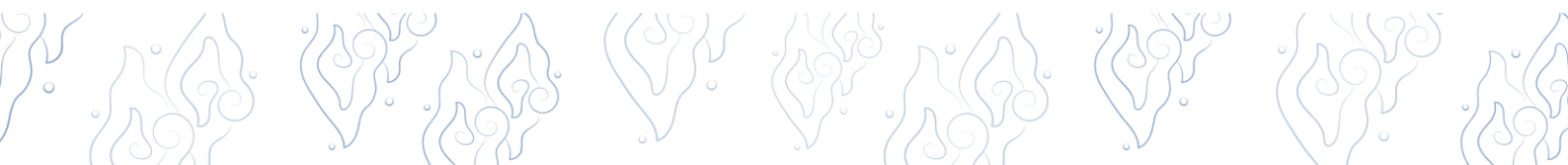


## Kegiatan 5

<b>Nama Kegiatan</b>	Penerimaan Audiensi & Dialog bersama Tim Bank Mandiri Cabang Sorong
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 21 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya

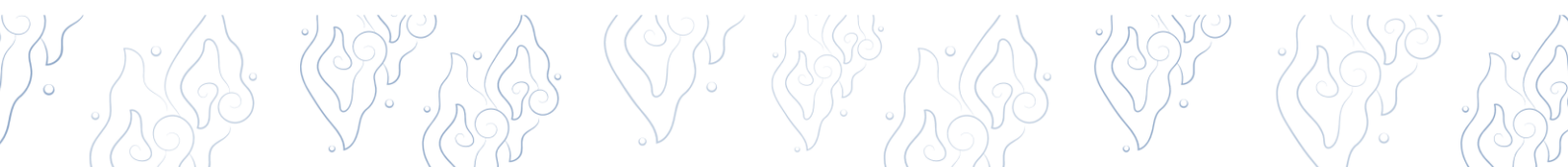


<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Lembaga perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan akses pembiayaan, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Dalam konteks pembangunan Papua Barat Daya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor perbankan menjadi penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Bank Mandiri Cabang Sorong melaksanakan audiensi dan dialog bersama BPP Papua Barat Daya untuk memperkenalkan berbagai layanan pembiayaan dan menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, termasuk dukungan terhadap pelaku UMKM, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima audiensi dan memperkuat komunikasi antara BPP Papua Barat Daya dan Bank Mandiri Cabang Sorong.</li> <li>2. Memperoleh informasi mengenai berbagai skema pembiayaan dan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.</li> <li>3. Mengidentifikasi peluang dukungan sektor perbankan terhadap pengembangan UMKM dan program prioritas pemerintah.</li> </ol>



	4. Mendorong sinergi antara sektor perbankan dan pelaku pembangunan dalam mendukung pelaksanaan Misi Papua Produktif.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Bank Mandiri Cabang Sorong;</li> <li>2. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>3. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya;</li> <li>4. Pokja terkait di lingkungan BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenalan layanan dan produk pembiayaan Bank Mandiri.</li> <li>2. Peluang pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha di Papua Barat Daya.</li> <li>3. Dukungan sektor perbankan terhadap pengembangan UMKM Orang Asli Papua (OAP).</li> <li>4. Potensi dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).</li> <li>5. Peluang pembiayaan dan penguatan kapasitas usaha yang mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).</li> <li>6. Peran sektor perbankan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Mandiri menyampaikan berbagai produk dan layanan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).</li> <li>2. Diperoleh informasi mengenai peluang dukungan sektor perbankan dalam pengembangan UMKM</li> </ol>

	<p>yang terlibat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Teridentifikasi peluang kolaborasi dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil yang memiliki keterkaitan dengan penyediaan bahan pangan dan kebutuhan operasional SPPG.</li> <li>4. Terbangun komunikasi awal antara BPP Papua Barat Daya dan Bank Mandiri terkait dukungan sektor perbankan terhadap pengembangan ekonomi produktif di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pelaksanaan koordinasi lanjutan antara sektor perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha terkait pemanfaatan skema pembiayaan produktif bagi UMKM.</li> <li>2. Mengidentifikasi potensi UMKM dan kelompok usaha Orang Asli Papua yang dapat memperoleh akses pembiayaan perbankan.</li> <li>3. Mendorong sinergi antara lembaga perbankan dan pelaksana Program MBG/SPPG dalam rangka memperkuat rantai pasok dan keberlanjutan program.</li> <li>4. Menindaklanjuti peluang kerja sama yang dapat mendukung pengembangan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	 <p>The image shows a group of approximately ten people in a meeting room. They are seated around a large white conference table. In the foreground, a man in a yellow shirt and a white cap is seated with his back to the camera. Other participants are looking towards a large screen at the end of the table, which displays a presentation with the title 'Lembangan SPPG'. There are laptops, water bottles, and documents on the table. The room has a whiteboard on the wall and a window in the background.</p>



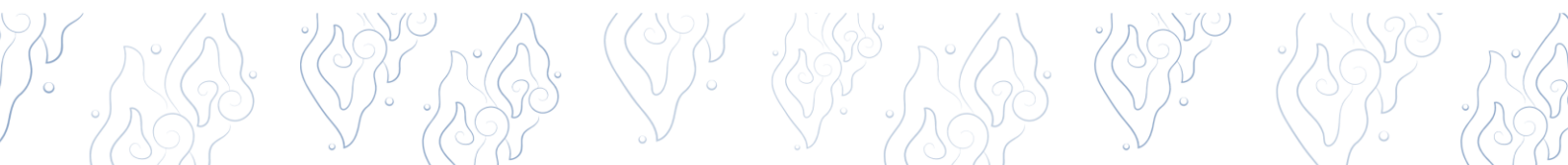


### Kegiatan 6

<b>Nama Kegiatan</b>	Penerimaan Audiensi & Dialog bersama Masyarakat (Bapak Andreas) terkait BUMD
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 21 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama menuju Tanah Papua. Selain didukung oleh letak geografis yang strategis, Papua Barat Daya juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat



	<p>besar pada sektor perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, energi, dan pariwisata bahari.</p> <p>Berbagai potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang dapat dikembangkan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>Dalam rangka menghimpun masukan dan aspirasi terkait pengembangan BUMD di Papua Barat Daya, BPP Papua Barat Daya menerima audiensi dan dialog bersama Bapak Andreas Simon sebagai praktisi dan pengamat industri yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan penguatan ekonomi daerah.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan</b> (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun masukan dan aspirasi terkait pengembangan BUMD di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Mengidentifikasi peluang pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.</li> <li>3. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan usaha daerah yang strategis.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi dan pertukaran gagasan terkait pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>2. Anggota Pokja Papua Produktif;</li> <li>3. Bapak Andreas Simon.</li> </ol>



<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang pengajuan Participating Interest (PI) sebesar 10% pada Wilayah Kerja Migas di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Gagasan penyusunan regulasi daerah yang mendukung hilirisasi sumber daya mineral, khususnya komoditas nikel.</li> <li>3. Peluang kepemilikan saham daerah pada perusahaan yang beroperasi di Papua Barat Daya.</li> <li>4. Pengembangan investasi sektor energi dan penyediaan air bersih untuk mendukung kawasan industri.</li> <li>5. Pemanfaatan potensi gas alam daerah sebagai sumber energi dalam mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan kawasan industri.</li> <li>6. Penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperoleh berbagai masukan dan gagasan strategis terkait pengembangan BUMD sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li> <li>2. Teridentifikasi sejumlah peluang usaha daerah yang berpotensi dikembangkan melalui BUMD, termasuk pengelolaan Participating Interest (PI) migas, sektor energi, dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.</li> <li>3. Terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi daerah guna mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam Papua Barat Daya.</li> </ol>

	4. Disepakati perlunya pembahasan lanjutan bersama perangkat daerah teknis dan DPR Papua Barat Daya terkait konsep, regulasi, dan model kelembagaan BUMD yang akan dikembangkan.
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pertemuan lanjutan bersama perangkat daerah teknis dan DPR Papua Barat Daya untuk membahas pengembangan BUMD secara lebih komprehensif.</li> <li>2. Mengkaji kebutuhan pembentukan BUMD yang secara khusus menangani Participating Interest (PI) sektor minyak dan gas.</li> <li>3. Mengkaji kemungkinan pembentukan BUMD yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan sektor sumber daya alam strategis lainnya.</li> <li>4. Menyusun kajian dan analisis terkait peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan peran BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Dokumentasi</b>	-

### Kegiatan 7

<b>Nama Kegiatan</b>	Forum SHEK Data OAP Terpilah
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Jum'at, 22 Mei 2026 di Aula KPPN Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) yang akurat, valid, dan terintegrasi merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Data OAP terpilah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan afirmatif dan

	<p>program pembangunan yang didanai melalui skema Otonomi Khusus dapat tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat OAP.</p> <p>Dalam implementasinya, pengelolaan data OAP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum sinkronnya data antarinstansi, perbedaan metodologi pendataan, keterbatasan integrasi data statistik dan administrasi kependudukan, serta belum optimalnya mekanisme validasi data lintas sektor. Oleh karena itu, BPP Papua Barat Daya menyelenggarakan Forum SHEK Data OAP Terpilah sebagai wadah koordinasi dan integrasi data lintas sektor di Provinsi Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan</b> <b>(Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatukan pemahaman dan persepsi lintas instansi terkait pentingnya integrasi data OAP terpilah.</li> <li>2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam pengelolaan data OAP.</li> <li>3. Mengevaluasi pelaksanaan pendataan OAP terpilah di Papua Barat Daya.</li> <li>4. Mendorong sinkronisasi data statistik dan data administrasi kependudukan.</li> <li>5. Mendukung penyediaan data OAP yang akurat, valid, dan berkelanjutan sebagai dasar pembangunan daerah.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pusat Statistik (BPS) se-Papua Barat Daya;</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Papua Barat Daya;</li> <li>3. Bappeda Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya;</li> <li>4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>5. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya;</li> <li>6. Program SKALA;</li> <li>7. Yayasan Sahabat Noken Mandiri;</li> <li>8. BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>

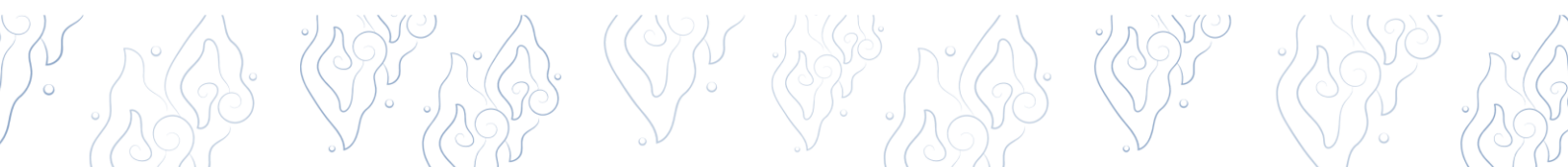
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	RIPPP - (Papua Produktif)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi dan perkembangan pendataan OAP terpilah di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Tantangan integrasi data antara Dukcapil, BPS, dan OPD teknis.</li> <li>3. Definisi dan kriteria OAP sebagai dasar pendataan.</li> <li>4. Integrasi data OAP dengan DTSEN dan sistem data sektoral lainnya.</li> <li>5. Penguatan regulasi, kelembagaan, dan sistem pendataan OAP.</li> <li>6. Strategi penguatan Satu Data Papua dan pengembangan sistem informasi OAP.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya integrasi data OAP terpilah sebagai dasar kebijakan pembangunan afirmatif di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Teridentifikasinya berbagai tantangan pengelolaan data OAP, termasuk perbedaan definisi OAP, keterbatasan integrasi sistem, dan belum sinkronnya data antarinstansi.</li> <li>3. Disepakatinya perlunya penguatan koordinasi antara BPS, Dukcapil, Bappeda, MRP, Dinas Sosial, dan perangkat daerah lainnya dalam proses pendataan dan validasi data OAP.</li> <li>4. Dihasilkannya sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan regulasi, integrasi data lintas sektor, digitalisasi sistem pendataan, validasi berbasis wilayah adat, dan penguatan Dashboard Satu Data Papua.</li> <li>5. Tersedianya data agregat OAP terpilah sebagai gambaran awal kondisi kependudukan OAP di</li> </ol>

	<p>Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah OAP sebanyak 296.210 jiwa dari total penduduk 614.415 jiwa.</p> <p>6. Forum menyimpulkan bahwa data OAP yang akurat dan terpadu merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan Papua yang adil, afirmatif, dan berkelanjutan.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong percepatan pengesahan Perdasus tentang Definisi Orang Asli Papua (OAP).</li> <li>2. Mendorong pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Data OAP Terpilah tingkat Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>3. Mendorong sinkronisasi data OAP antara Dukcapil, BPS, dan pemerintah daerah.</li> <li>4. Mengembangkan sistem pendataan OAP terintegrasi dan berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong penambahan variabel khusus OAP dalam sistem pendataan sosial ekonomi.</li> <li>6. Memperkuat pelibatan pemerintah kampung, tokoh adat, dan masyarakat dalam proses pendataan OAP.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	



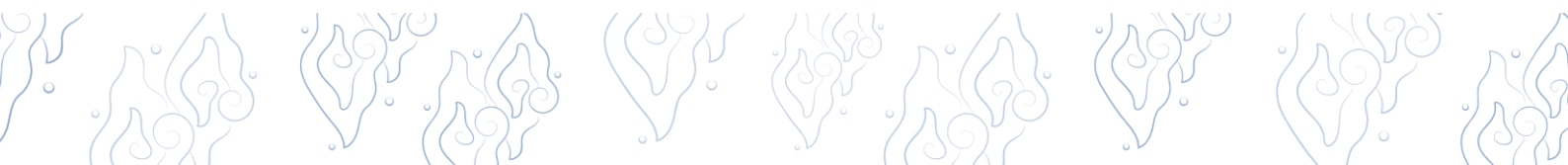
### Kegiatan 8

<b>Nama Kegiatan</b>	Penerimaan Audiensi & Dialog bersama LSM Asosiasi Mama-Mama Papua se-Tanah Papua
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 26 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Perempuan Papua, khususnya mama-mama Papua, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha mikro dan usaha berbasis komunitas. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha, antara lain keterbatasan akses permodalan, penguatan kelembagaan usaha, peningkatan kapasitas



	<p>manajemen, serta akses terhadap program pemberdayaan ekonomi.</p> <p>Dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mama-mama Papua dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, Asosiasi Mama-Mama Papua se-Tanah Papua melaksanakan audiensi dan dialog bersama BPP Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi serta memperoleh dukungan dalam penyusunan proposal dan pengembangan program usaha yang dapat diusulkan kepada pemerintah maupun pihak terkait.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menghimpun aspirasi dari Asosiasi Mama-Mama Papua se-Tanah Papua.</li> <li>2. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan terhadap pengembangan usaha ekonomi mama-mama Papua.</li> <li>3. Memberikan masukan terkait penyusunan proposal program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi Orang Asli Papua (OAP).</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwakilan Asosiasi Mama-Mama Papua se-Tanah Papua;</li> <li>2. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi dan tantangan pengembangan usaha yang dijalankan oleh mama-mama Papua.</li> <li>2. Kebutuhan dukungan pembiayaan dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> </ol>

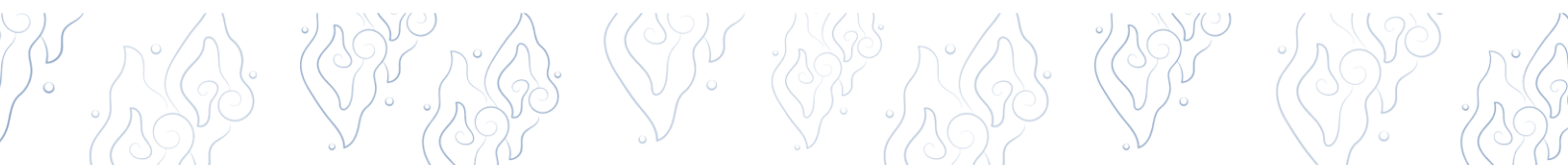
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyusunan proposal program dan kegiatan yang dapat diusulkan kepada pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya.</li> <li>4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat.</li> <li>5. Peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan Papua.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPP Papua Barat Daya menerima dan menghimpun aspirasi yang disampaikan oleh Asosiasi Mama-Mama Papua se-Tanah Papua terkait pengembangan usaha ekonomi masyarakat.</li> <li>2. Teridentifikasi kebutuhan dukungan dalam penyusunan proposal program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dapat diajukan kepada pemerintah dan lembaga terkait.</li> <li>3. Terbangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara BPP Papua Barat Daya dan kelompok usaha mama-mama Papua dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.</li> <li>4. Diperoleh informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, dan pengembangan pasar.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pendampingan dan masukan teknis dalam penyusunan proposal program pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> <li>2. Mengidentifikasi peluang dukungan program dan sumber pendanaan yang dapat diakses oleh kelompok usaha mama-mama Papua.</li> <li>3. Mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan</li> </ol>



	<p>lainnya dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi perempuan Papua.</p> <p>4. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen usaha bagi kelompok usaha mama-mama Papua guna meningkatkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>Dokumentasi</b>	

### Kegiatan 9

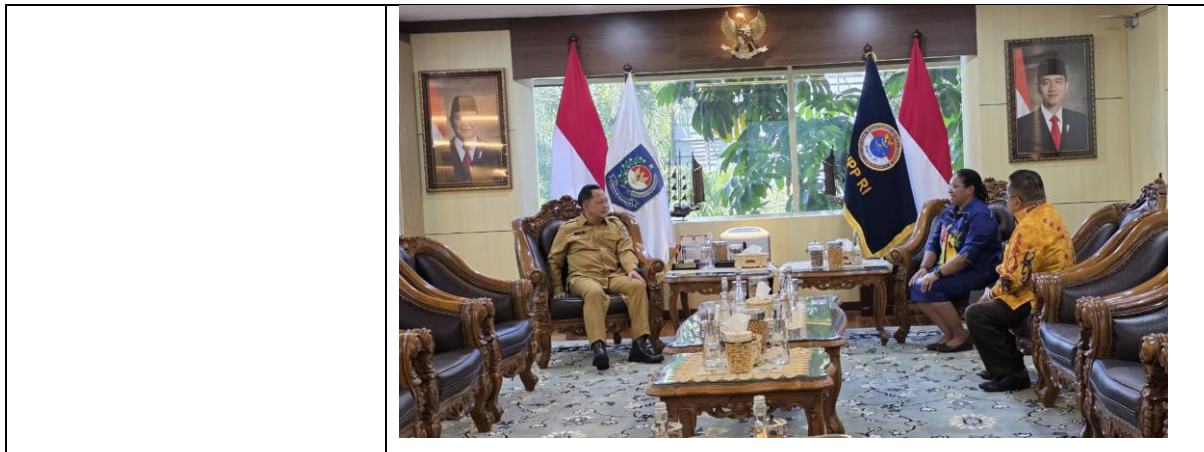
<b>Nama Kegiatan</b>	Pendampingan (SHEK) BPP PBD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan: Konsultasi Investasi dan PAD
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 26 Mei 2026 di Kantor Mendagri, Jakarta
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua



<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berupaya mendorong peningkatan investasi serta optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Sorong Selatan memiliki berbagai potensi unggulan pada sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan ekonomi berbasis sumber daya alam yang memerlukan dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, BPP Papua Barat Daya melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh arahan serta dukungan terkait strategi peningkatan investasi daerah dan optimalisasi PAD sebagai bagian dari implementasi percepatan pembangunan Papua.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendampingi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam pelaksanaan konsultasi terkait investasi dan peningkatan PAD.</li> <li>2. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.</li> <li>3. Mengidentifikasi peluang pengembangan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong Selatan.</li> <li>4. Menghimpun masukan terkait strategi optimalisasi sumber-sumber PAD daerah.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Bupati Sorong Selatan).</li> <li>2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.</li> <li>3. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>

<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi investasi strategis yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sorong Selatan.</li> <li>2. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.</li> <li>3. Strategi penguatan iklim investasi daerah yang kondusif dan berkelanjutan.</li> <li>4. Pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.</li> <li>5. Dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan ekonomi di daerah Otonomi Khusus Papua.</li> <li>6. Penguatan tata kelola investasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menarik investor.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan memperoleh masukan dan arahan terkait strategi pengembangan investasi daerah dan peningkatan PAD.</li> <li>2. Teridentifikasi sejumlah sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penerimaan daerah.</li> <li>3. Terbangun koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPP Papua Barat Daya dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.</li> <li>4. BPP Papua Barat Daya melaksanakan fungsi pendampingan dan SHEK guna memastikan aspirasi dan kebutuhan daerah dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat.</li> </ol>

<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan perlu menyusun peta potensi investasi daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</li><li>2. Perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga terkait guna mendukung percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sorong Selatan.</li><li>3. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang memiliki potensi peningkatan penerimaan daerah.</li><li>4. BPP Papua Barat Daya akan terus mengawal dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung penguatan ekonomi daerah serta implementasi Misi Papua Produktif.</li></ol>
<b>Dokumentasi</b>	 A photograph showing three individuals standing in a formal meeting room. On the left is a man in a yellow batik shirt and black trousers. In the center is a man in a brown uniform. On the right is a woman in a blue batik dress. They are standing in front of a large window with Indonesian and regional flags. A coffee table with refreshments is in the foreground.



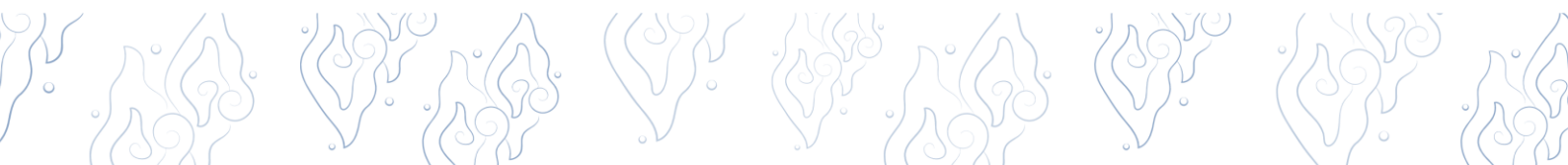
### 3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)

#### Kegiatan 1

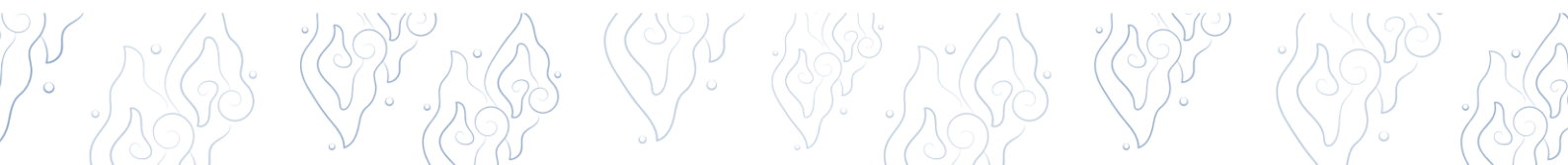
<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif (Arahan & SHEK) BPP PBD dalam Kegiatan Rapat Internal Direktorat Intelkam Polda Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin, 4 Mei 2026 di Hotel Bellagri Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Barat Daya menyelenggarakan Rapat Internal yang menghadirkan Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya sebagai narasumber guna memberikan pemahaman mengenai kelembagaan BPP, arah kebijakan</p>

	percepatan pembangunan Papua, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan peran BPP dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>2. Menyampaikan arah kebijakan pembangunan Papua yang selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</li> <li>3. Memperkuat sinergi dan koordinasi antara BPP dan aparat keamanan dalam mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.</li> <li>4. Mendorong kolaborasi dalam penanganan berbagai isu strategis di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>2. Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Barat Daya;</li> <li>3. Personel Ditintelkam Polda Papua Barat Daya;</li> <li>4. Undangan dan peserta terkait lainnya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Pengarahan dan SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Damai/Polhukam
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP/BP3OKP).</li> <li>2. Tugas dan fungsi BPP dalam pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>3. Keterkaitan pelaksanaan RIPPP dan RAPPP dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</li> <li>4. Peran BPP dalam mendukung Misi Papua Damai dan Papua Produktif.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Upaya penanganan dinamika keamanan di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau.</li> <li>6. Tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>7. Penguatan sinergi antara BPP dan aparat keamanan dalam mendukung pembangunan daerah.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kelembagaan, tugas, dan fungsi BPP dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>2. Tersampainya berbagai langkah strategis BPP Papua Barat Daya dalam mendukung pelaksanaan Misi Papua Damai dan Papua Produktif.</li> <li>3. Disampaikannya informasi mengenai fasilitasi audiensi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maybrat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia terkait penanganan dinamika keamanan di wilayah tersebut.</li> <li>4. Terlaksananya diskusi strategis mengenai isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Barat Daya, termasuk tantangan penanganan tindak kriminalitas.</li> <li>5. Menguatnya komitmen bersama untuk terus membangun sinergi dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, mandiri, adil, dan sejahtera.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara BPP dan aparat keamanan dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>2. Mendorong pelaksanaan forum-forum koordinasi secara berkala terkait isu strategis keamanan dan pembangunan daerah.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung stabilitas keamanan sebagai prasyarat percepatan pembangunan Papua.</li><li>4. Melakukan penguatan diseminasi informasi terkait kebijakan percepatan pembangunan Papua kepada para pemangku kepentingan di daerah.</li></ol>
<b>Dokumentasi</b>	 <p>The top photograph shows two men seated at a long table during a meeting. The man on the left is speaking into a microphone. The man on the right is listening. There are laptops, water bottles, and nameplates on the table. The middle photograph shows a large group of people seated around a long table in a conference room, engaged in a discussion. The bottom photograph shows two men shaking hands in front of a banner that reads 'KAMPUS INTTELKAMPOLURE POLDA PAPUA BARU TW. 1981-2021 SORONG 2021'.</p>

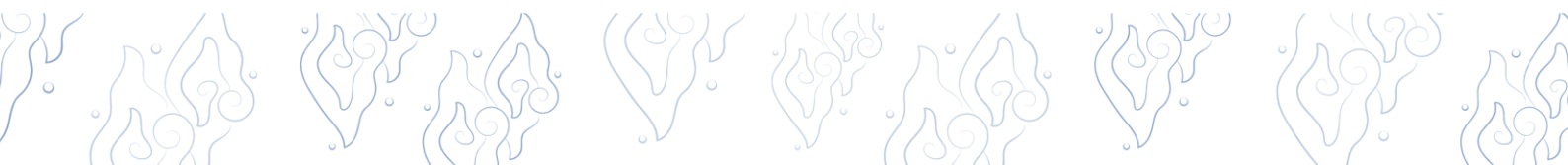


## Kegiatan 2

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Serta BPP PBD dalam Kegiatan Jamuan Makan Malam oleh Partai Solidaritas Indonesia bersama Kaesang Pangarep
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 5 Mei 2026 di Marina Jetty Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025. Dalam struktur kelembagaan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai Ketua Badan Pengarah Papua.</p> <p>Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, komunikasi antara Anggota BPP se-Tanah Papua dengan Ketua BPP menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala komunikasi yang menyebabkan penyampaian aspirasi, masukan, dan laporan dari anggota BPP kepada Ketua BPP belum berjalan secara optimal.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, BPP Papua Barat Daya memanfaatkan momentum pertemuan bersama Bapak Kaesang Pangarep untuk menyampaikan aspirasi kelembagaan sekaligus memohon dukungan dalam menjembatani komunikasi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua BPP.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	1. Menyampaikan surat resmi BPP kepada Bapak Kaesang Pangarep.

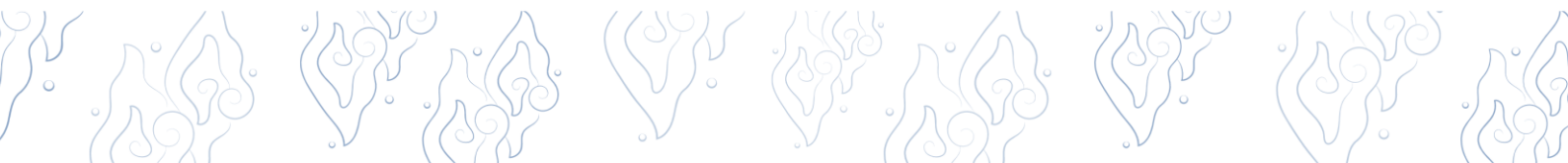
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memohon dukungan agar surat tersebut dapat diteruskan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua BPP.</li> <li>3. Mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih efektif antara Anggota BPP se-Tanah Papua dengan Ketua BPP.</li> <li>4. Memohon fasilitasi pertemuan antara Anggota BPP dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>2. Tokoh masyarakat;</li> <li>3. Tokoh agama;</li> <li>4. Tokoh perempuan;</li> <li>5. Pimpinan DPR Papua Barat Daya dan DPR Kabupaten/Kota;</li> <li>6. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Damai/Polhukam (Harmoni Sosial)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian surat resmi BPP kepada Bapak Kaesang Pangarep.</li> <li>2. Permohonan dukungan dalam menyampaikan aspirasi BPP kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua BPP.</li> <li>3. Hambatan komunikasi yang dihadapi anggota BPP dalam menyampaikan laporan dan aspirasi kepada Ketua BPP.</li> <li>4. Pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara BPP dan pimpinan nasional dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.</li> <li>5. Harapan pelaksanaan pertemuan antara Anggota BPP se-Tanah Papua dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</li> </ol>

<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat resmi BPP telah diterima secara langsung oleh Bapak Kaesang Pangarep.</li> <li>2. Bapak Kaesang Pangarep memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh BPP.</li> <li>3. Disampaikan komitmen untuk membantu mengawal penyampaian surat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua BPP.</li> <li>4. Terbangun komunikasi yang baik terkait kebutuhan penguatan koordinasi antara BPP dan Ketua BPP.</li> <li>5. Terdapat komitmen untuk membantu memfasilitasi pertemuan antara Anggota BPP se-Tanah Papua dengan Wakil Presiden Republik Indonesia.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi dan koordinasi lanjutan secara berkala terkait tindak lanjut surat yang telah disampaikan.</li> <li>2. Menyiapkan bahan, isu strategis, dan agenda yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia apabila fasilitasi pertemuan dapat dilaksanakan.</li> <li>3. Mendorong Anggota BPP se-Tanah Papua untuk menyusun isu prioritas percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebagai bahan pembahasan bersama Ketua BPP.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi dengan Sekretariat Wakil Presiden guna mendukung efektivitas komunikasi kelembagaan BPP.</li> <li>5. Menindaklanjuti hasil pertemuan dalam bentuk rekomendasi dan langkah konkret yang mendukung percepatan pembangunan Papua dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.</li> </ol>

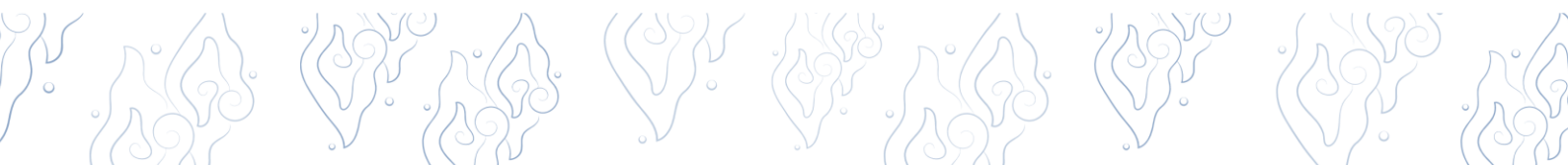


**Dokumentasi****Kegiatan 3****Nama Kegiatan**

Penerimaan Audiensi & Dialog bersama Tim Panitia  
Rapat Kerja Daerah Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat  
Provinsi Papua Barat Daya



<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 19 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Keberagaman suku, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat Daya merupakan modal sosial yang penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sosial dan pembangunan daerah yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan ruang komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat guna memperkuat persatuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya, panitia pelaksana melakukan audiensi dan dialog bersama BPP Papua Barat Daya untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi kelembagaan, serta menyampaikan undangan kepada Anggota BPP Papua Barat Daya sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempererat hubungan silaturahmi dan harmonisasi sosial antara BPP Papua Barat Daya dan organisasi kemasyarakatan.</li> <li>2. Membangun komunikasi dan koordinasi yang konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah.</li> <li>3. Menerima penyampaian undangan resmi kepada Anggota BPP Papua Barat Daya sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>

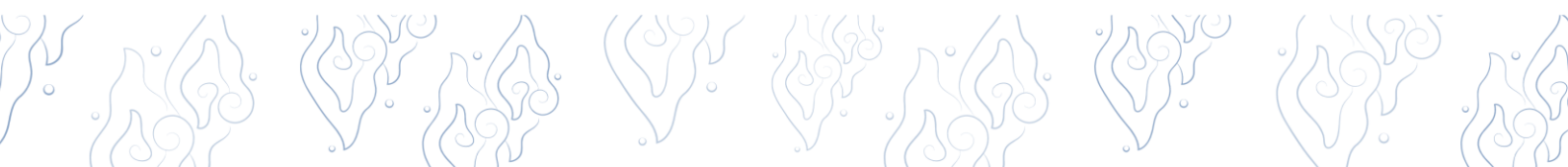


	4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
<b>Peserta Kegiatan</b>	1. Tim Panitia Rapat Kerja Daerah Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya; 2. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Harmonisasi dan Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Damai/Polhukam (Harmoni Sosial)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	1. Penyampaian maksud dan tujuan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya. 2. Peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan dan menjaga harmonisasi sosial di Papua Barat Daya. 3. Penyampaian undangan kepada Anggota BPP Papua Barat Daya untuk hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah. 4. Penguatan komunikasi dan sinergi antara organisasi masyarakat dan BPP Papua Barat Daya. 5. Dukungan terhadap terciptanya stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis di Papua Barat Daya.
<b>Hasil Kegiatan</b>	1. Terjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik antara BPP Papua Barat Daya dan Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya. 2. BPP Papua Barat Daya menerima undangan resmi untuk berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat. 3. Terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam

	<p>menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas sosial di Papua Barat Daya.</p> <p>4. Tercipta ruang dialog yang positif dalam mendukung sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti undangan partisipasi BPP Papua Barat Daya sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat.</li> <li>2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pembangunan daerah.</li> <li>3. Mendorong keterlibatan organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.</li> <li>4. Mengembangkan forum komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara BPP dan berbagai elemen masyarakat.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	


#### Kegiatan 4

<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Aktif BPP PBD dalam Kegiatan Rapat Kerja Daerah Iptema &amp; Musyawarah Pimpinan Cabang</p>
-----------------------------	--



	Pertama - Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Sabtu, 23 Mei 2026 di Hotel Mariat Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang aktif di Provinsi Papua Barat Daya, Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah I dan Musyawarah Pimpinan Cabang I sebagai forum konsolidasi organisasi serta penyusunan program kerja yang mendukung pembangunan daerah.</p> <p>Dalam rangka memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah, BPP Papua Barat Daya menghadiri kegiatan tersebut sekaligus memenuhi undangan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi terkait percepatan pembangunan Papua dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi undangan sebagai narasumber pada Rapat Kerja Daerah I dan Musyawarah Pimpinan Cabang I Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi BPP dalam percepatan pembangunan Papua.</li> <li>3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan arah pembangunan di Tanah Papua.</li> </ol>

	4. Memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>2. Pengurus cabang Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Tokoh masyarakat dan tokoh adat;</li> <li>4. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>5. Undangan lainnya</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Pengarahan dan Harmonisasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Damai/Polhukam (Harmoni Sosial)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah.</li> <li>2. Tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>3. Implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).</li> <li>4. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah.</li> <li>5. Penguatan kolaborasi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan BPP.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	1. Terlaksananya penyampaian materi oleh BPP Papua Barat Daya kepada peserta Rapat Kerja Daerah I dan Musyawarah Pimpinan Cabang I Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat.

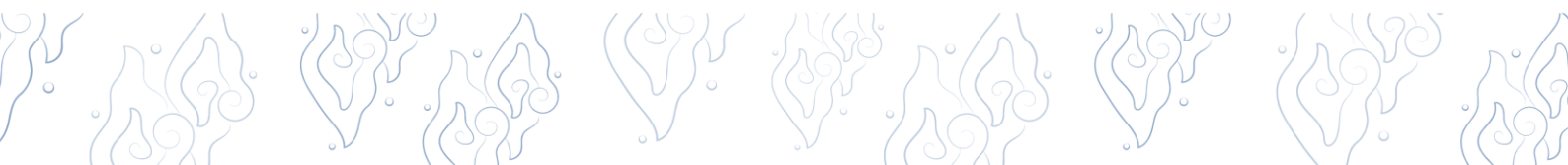
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai tugas dan fungsi BPP serta arah kebijakan percepatan pembangunan Papua.</li> <li>3. Terbangunnya komunikasi dan sinergi yang lebih baik antara BPP Papua Barat Daya dan organisasi kemasyarakatan.</li> <li>4. Meningkatnya komitmen bersama dalam mendukung stabilitas sosial, persatuan masyarakat, dan percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kemitraan antara BPP Papua Barat Daya dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>2. Mendorong keterlibatan organisasi masyarakat dalam forum-forum pembangunan daerah.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan secara berkelanjutan kepada masyarakat.</li> <li>4. Mengembangkan ruang dialog dan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, BPP, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung Papua yang aman, damai, dan sejahtera.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	



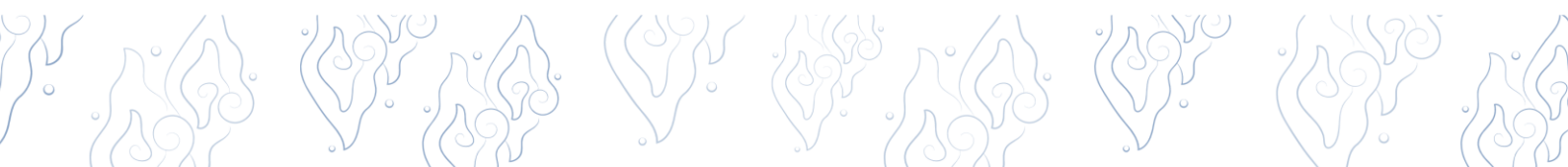
### 3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)

#### Kegiatan 1

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif (SHEK) BPP PBD dalam Kegiatan Desk hingga Penutupan Musrenbang RKPD & Otsus Tahun 2027 Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin-Rabu, 4-6 Mei 2026 di Rylich Panorama Hotel Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 merupakan forum strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, Rencana Induk Percepatan Pembangunan

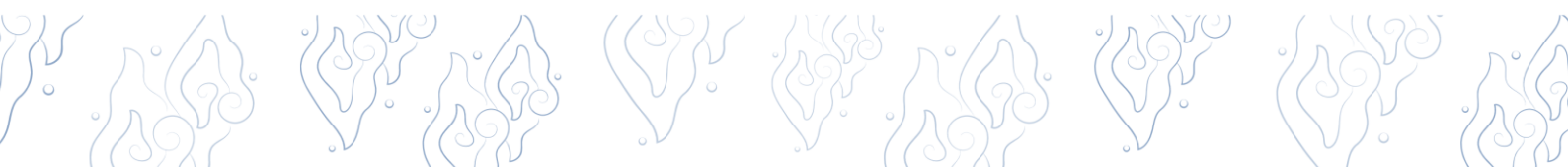


	<p>Papua (RIPPP), Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029, serta kebutuhan riil masyarakat di Papua Barat Daya.</p> <p>Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027 menitikberatkan pada sinkronisasi program pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.</p> <p>Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan desk pembahasan hingga penutupan Musrenbang guna memastikan program dan kegiatan yang diusulkan selaras dengan arah pembangunan Papua dan berpihak kepada masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan fungsi SHEK dalam proses penyusunan RKPD dan Otsus Tahun 2027.</li> <li>2. Menjadi tim pembahas pada desk Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027.</li> <li>3. Mengawal agar usulan program dan kegiatan selaras dengan RIPPP, RAPPP, RPJMN, dan RPJPD Papua Barat Daya.</li> <li>4. Mendorong sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.</li> <li>5. Memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.</li> <li>6. Memberikan masukan strategis terhadap usulan program dan kegiatan perangkat daerah.</li> </ol>



	<p>7. Menghadiri penutupan Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027.</p> <p>8. Mewakili Pimpinan BPP dalam proses paraf koordinasi dan penandatanganan Berita Acara Musrenbang Tahun 2027.</p>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya.</li> <li>4. Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>5. DPR Papua Barat Daya dan MRP Papua Barat Daya.</li> <li>6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>7. Instansi Vertikal Pemerintah Pusat.</li> <li>8. Akademisi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM.</li> <li>10. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.</li> <li>11. Pelaku usaha dan UMKM.</li> <li>12. Unsur masyarakat adat Papua.</li> <li>13. BPP Papua Barat Daya (Pokja).</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	RIPPP – Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai/Polhukam (Prasyarat Pembangunan)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p><b>Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>• Pembahasan usulan program dan kegiatan RKPD dan Otsus Tahun 2027.</li> <li>• Sinkronisasi program kabupaten/kota dengan program provinsi.</li> <li>• Pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Musrenbang.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelarasan program prioritas pembangunan dengan RIPPP, RAPPP, RPJMN, dan RPJPD.</li> </ul> <p><b>Desk Papua Sehat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan dasar.</li> <li>• Penanganan stunting.</li> <li>• Program MBG.</li> <li>• Penguatan fasilitas kesehatan.</li> </ul> <p><b>Desk Papua Cerdas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan mutu pendidikan.</li> <li>• Pendidikan vokasi.</li> <li>• Program afirmasi OAP.</li> <li>• Penguatan SDM Papua.</li> </ul> <p><b>Desk Papua Produktif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur dan PUPR.</li> <li>• Pertanian dan ketahanan pangan.</li> <li>• Perikanan dan kelautan.</li> <li>• UMKM dan koperasi.</li> <li>• Pariwisata.</li> <li>• Perhubungan.</li> <li>• Kehutanan dan lingkungan hidup.</li> <li>• Perumahan dan kawasan permukiman.</li> </ul> <p><b>Desk Papua Damai/Polhukam</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan stabilitas sosial.</li> <li>2. Rumah layak huni bagi masyarakat terdampak konflik.</li> <li>3. Pemetaan wilayah adat.</li> <li>4. Tata kelola kawasan hutan dan ruang adat.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<p><b>Hasil Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPP Papua Barat Daya berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan desk pembahasan Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027 serta mengikuti rangkaian kegiatan hingga penutupan Musrenbang.</li> </ol>



2. BPP Papua Barat Daya turut memberikan pengarahannya dan pertimbangan dalam pembahasan program prioritas pembangunan daerah.
3. BPP Papua Barat Daya mewakili pimpinan dalam proses paraf koordinasi dan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027.
4. Tersusunnya kesepakatan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

#### **Desk Papua Sehat**

1. Prosedur pelaksanaan Musrenbang Otsus belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musrenbang Otonomi Khusus.
2. Arah kebijakan pembangunan yang disampaikan kepala daerah belum menjelaskan secara rinci prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah.
3. Kolaborasi antar OPD yang memiliki irisan program masih belum optimal sehingga masih ditemukan potensi duplikasi program dan kegiatan.
4. Perencanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada RAPP Tahun 2025–2029.
5. Belum terdapat identifikasi yang jelas terkait pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program prioritas.

6. Perencanaan kegiatan masih belum berbasis analisis data dan capaian pembangunan tahun sebelumnya.
7. Sebagian usulan kegiatan belum berbasis kebutuhan riil masyarakat maupun kebutuhan kolaborasi lintas sektor.
8. Beberapa OPD belum mampu menjelaskan dampak program yang diusulkan terhadap pencapaian indikator pembangunan.
9. Beberapa OPD belum mampu menjelaskan kontribusi program terhadap pemberdayaan Orang Asli Papua.
10. Musrenbang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kelompok inklusi, khususnya penyandang disabilitas.

#### **Desk Papua Produktif**


1. Ditemukan sejumlah usulan program yang belum fokus pada lokus prioritas sehingga berpotensi mengurangi efektivitas intervensi pembangunan.
2. Banyak usulan kegiatan belum dilengkapi KAK, DED, maupun data pendukung yang memadai sebagai dasar pembahasan dan penganggaran.
3. Pemerintah Kota Sorong tidak mengirimkan perwakilan pada desk pembahasan sehingga tidak terdapat usulan program yang dapat dibahas pada forum tingkat provinsi.
4. Data pendukung berbagai usulan kegiatan masih belum lengkap, termasuk data koperasi, UMKM, dan data penerima manfaat program.
5. Program strategis nasional seperti cetak sawah, pengembangan kelapa dalam, budidaya rumput laut,

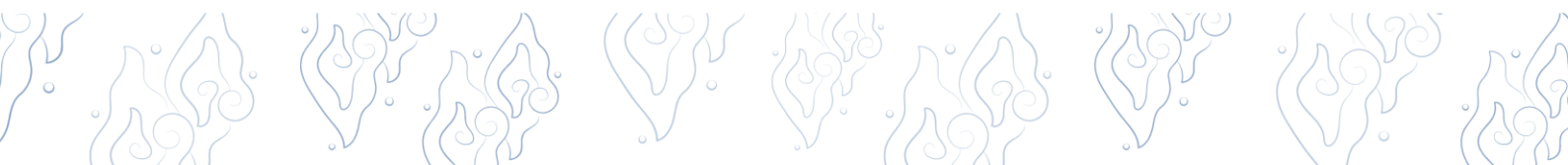
	<p>perikanan, udang, dan MBG menjadi fokus prioritas pembangunan ekonomi daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Belum terdapat usulan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 33 Tahun 2024.</li> <li>7. Data OAP Terpilah belum digunakan secara optimal sebagai dasar penyusunan program dan penentuan lokus kegiatan.</li> <li>8. Pokja Papua Produktif berhasil menyampaikan berbagai masukan strategis guna memperkuat keberpihakan program kepada Orang Asli Papua.</li> <li>9. Terdapat peluang pendanaan melalui APBN, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB).</li> </ol> <p><b>Desk Papua Damai</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat usulan pembangunan enam kantor OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang masih terkendala kelengkapan dokumen pendukung.</li> <li>2. Belum terdapat program yang secara spesifik mendukung pemulihan korban konflik bersenjata di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.</li> <li>3. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Satpol PP belum sepenuhnya didasarkan pada analisis situasi keamanan dan ketertiban di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p><b>Desk Papua Sehat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapperida perlu memastikan pelaksanaan Musrenbang Otsus mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Materi kepala daerah dan kementerian/lembaga perlu memuat evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya dan target tahun berikutnya.</li> </ol>

3. Bapperida perlu memperkuat fungsi analisis dan sinkronisasi usulan program sejak tahapan awal perencanaan.
4. OPD perlu memastikan perencanaan program mengacu pada RAPPP dan dokumen perencanaan lainnya.
5. Perlu dilakukan pemetaan kewenangan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Perencanaan program harus berbasis data dan capaian indikator pembangunan.
7. Bapperida perlu meningkatkan kualitas analisis terhadap usulan program dan kegiatan OPD.
8. Pimpinan OPD perlu memastikan program yang diusulkan mendukung pencapaian visi, misi, dan indikator pembangunan daerah.
9. Program pembangunan perlu menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada Orang Asli Papua.
10. Musrenbang Inklusif perlu dilaksanakan sejak tahapan kampung, distrik, hingga kabupaten/kota.

#### **Desk Papua Produktif**

1. Bapperida perlu memperkuat koordinasi antar OPD sebelum pelaksanaan desk Musrenbang.
2. Seluruh usulan program wajib dilengkapi KAK, DED, dan dokumen teknis lainnya.
3. Setiap usulan program harus didukung data yang valid dan terukur.
4. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mengacu pada RPJMN, RPJMD, RIPP, dan RAPPP.
5. Bapperida perlu mendorong penyusunan PPSB sejak tahapan Musrenbang Kabupaten/Kota.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Perencanaan program harus berbasis outcome dan indikator kinerja yang jelas.</li> <li>7. Sumber pembiayaan perlu dipisahkan secara jelas sejak awal pembahasan.</li> <li>8. Pelaksanaan Musrenbang perlu memperhatikan efektivitas waktu dan manajemen kegiatan.</li> <li>9. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memastikan kehadiran dalam seluruh tahapan Musrenbang tingkat provinsi.</li> <li>10. BPP Papua Barat Daya perlu mengawal program strategis yang mendukung peningkatan PAD dan pemberdayaan ekonomi OAP.</li> </ol> <p><b>Desk Papua Damai</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dukungan dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terkait pembangunan fasilitas perkantoran pemerintah daerah.</li> <li>2. Pemerintah daerah perlu menyusun program khusus yang mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak konflik.</li> <li>3. Program ketenteraman dan ketertiban umum perlu disusun berdasarkan analisis kondisi riil dan kebutuhan daerah.</li> <li>4. Perlu penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan Misi Papua Damai di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	



## Kegiatan 2

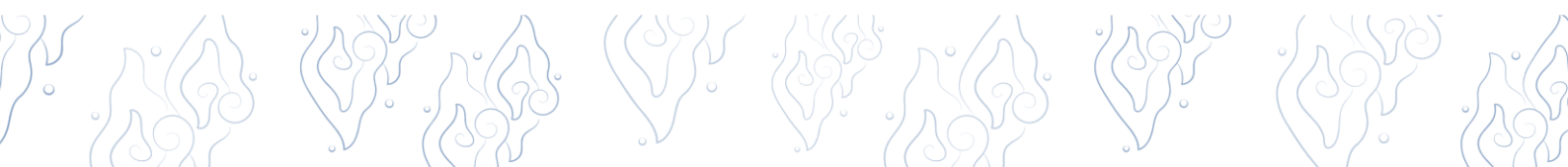
<b>Nama Kegiatan</b>	Ramah Tamah bersama Kepala Kanwil DJBC Papua
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 5 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	<p>Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya pada sektor perikanan, perkebunan, pertanian, dan komoditas unggulan lainnya yang berpeluang untuk dikembangkan dalam kegiatan ekspor. Namun demikian, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur logistik, akses pasar, kapasitas produksi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.</p> <p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Papua Produktif sebagaimana diamanatkan dalam RIPPP dan RAPPP, BPP Papua Barat Daya perlu membangun komunikasi dan sinergi dengan instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan arus barang, perdagangan internasional, dan pengembangan ekspor daerah. Oleh karena itu, dilaksanakan pertemuan ramah tamah dan silaturahmi bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua sebagai langkah awal memperkuat koordinasi terkait pengembangan impor-ekspor di Papua Barat Daya.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dengan Kanwil DJBC Khusus Papua.</li> <li>2. Mengidentifikasi potensi komoditas unggulan Papua Barat Daya yang memiliki peluang ekspor.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menghimpun informasi awal mengenai tantangan dan peluang pengembangan kegiatan ekspor di Papua Barat Daya.</li> <li>4. Menjalin sinergi dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan ekspor.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua beserta jajaran.</li> <li>2. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi dan Harmonisasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif dan Papua Damai/Polhukam (Harmoni Sosial)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran umum kondisi perdagangan dan aktivitas ekspor-impor di wilayah Papua Barat Daya.</li> <li>2. Potensi komoditas unggulan daerah yang berpeluang untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor.</li> <li>3. Tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor, termasuk aspek logistik dan transportasi.</li> <li>4. Peran Bea dan Cukai dalam mendukung peningkatan ekspor daerah.</li> <li>5. Peluang kolaborasi antara BPP Papua Barat Daya dan DJBC dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara BPP Papua Barat Daya dan Kanwil DJBC Khusus Papua.</li> <li>2. Diperoleh informasi awal mengenai potensi ekspor komoditas unggulan Papua Barat Daya, khususnya sektor perikanan dan hasil perkebunan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Teridentifikasi sejumlah kendala dalam pengembangan ekspor daerah, terutama terkait kapasitas logistik dan konektivitas transportasi.</li> <li>4. Disepakati perlunya forum koordinasi lanjutan yang melibatkan OPD teknis, pelaku usaha, dan instansi terkait guna membahas pengembangan ekspor daerah secara lebih komprehensif.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan SHEK lanjutan bersama Kanwil DJBC Khusus Papua terkait penguatan ekspor komoditas unggulan Papua Barat Daya.</li> <li>2. Mengidentifikasi komoditas prioritas yang berpotensi menjadi produk ekspor unggulan daerah.</li> <li>3. Mendorong keterlibatan OPD teknis dan pelaku usaha dalam penyusunan strategi pengembangan ekspor daerah.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengatasi hambatan logistik dan distribusi yang mempengaruhi kegiatan ekspor di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	

### Kegiatan 3

<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Kick off Meeting: Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004</p>
-----------------------------	--



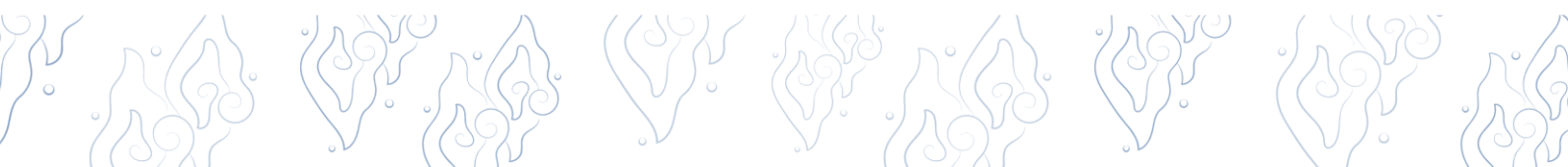
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 7 Mei 2026 di Hotel Grand Mercure, Jakarta
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan salah satu regulasi penting dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, serta perubahan regulasi Otonomi Khusus Papua, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur kelembagaan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Majelis Rakyat Papua agar selaras dengan dinamika pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Tanah Papua. Dalam rangka itu, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Kick Off Meeting Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengarah Papua.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Mengikuti pembahasan awal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 serta memberikan masukan terkait implementasi Otonomi Khusus Papua dan penguatan kelembagaan representasi kultural Orang Asli Papua.
<b>Peserta Kegiatan</b>	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, Majelis Rakyat Papua (MRP), Majelis Rakyat Papua Provinsi, pemerintah daerah se-Tanah Papua, akademisi, tokoh masyarakat, serta Badan Pengarah Papua (BPP).

<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Damai/Polhukam (Strategis)
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	Pertemuan membahas urgensi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dalam rangka menyesuaikan perkembangan regulasi Otonomi Khusus Papua pasca pembentukan DOB. Selain itu dibahas berbagai masukan terkait penguatan kedudukan dan peran MRP, mekanisme representasi Orang Asli Papua, hubungan kelembagaan antara MRP dan pemerintah daerah, serta harmonisasi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
<b>Hasil Kegiatan</b>	Kick Off Meeting menghasilkan kesepakatan mengenai pentingnya penyempurnaan regulasi yang mengatur Majelis Rakyat Papua agar lebih adaptif terhadap perkembangan kelembagaan dan kebutuhan masyarakat Papua. Berbagai masukan dari peserta akan menjadi bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan perubahan peraturan pemerintah. Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, MRP, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	Perlu dilakukan pembahasan lanjutan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua guna memastikan substansi perubahan peraturan pemerintah mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. BPP Papua Barat Daya akan terus mengawal proses penyusunan regulasi tersebut serta memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi

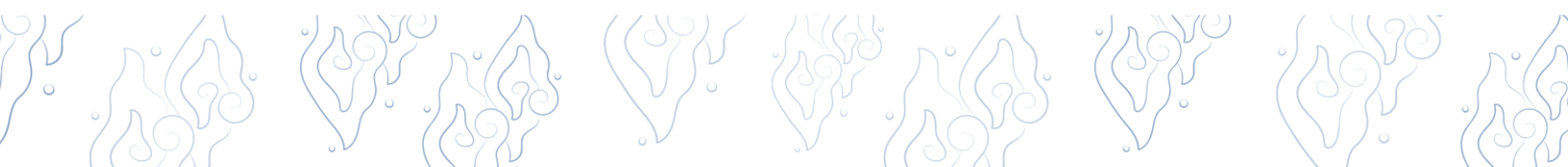
	Khusus Papua dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif di Tanah Papua.
<b>Dokumentasi</b>	 

#### Kegiatan 4

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP dalam Kegiatan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua (Timika)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin-Selasa, 11-12 Mei 2026 di Hotel Horison Diana, Timika
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua merupakan forum koordinasi antar pemerintah provinsi di Tanah Papua yang bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, memperkuat sinergi lintas wilayah, serta mempercepat

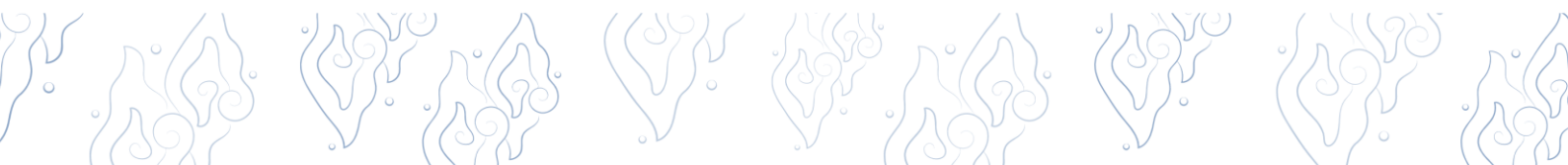


	<p>pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Forum ini menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan yang berdampak pada seluruh wilayah Papua, termasuk implementasi RIRPP dan RARPP, pengelolaan Dana Otsus, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan kelembagaan pembangunan Papua. Kehadiran BPP Papua Barat Daya pada forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan Papua secara terpadu.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri dan mengikuti Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua.</li> <li>2. Menghimpun informasi dan arah kebijakan strategis pembangunan Papua hasil kesepakatan para gubernur se-Tanah Papua.</li> <li>3. Mendukung sinkronisasi pelaksanaan RIRPP dan RARPP di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gubernur Papua Tengah;</li> <li>2. Gubernur Papua;</li> <li>3. Gubernur Papua Barat;</li> <li>4. Gubernur Papua Selatan;</li> <li>5. Gubernur Papua Pegunungan;</li> <li>6. Gubernur Papua Barat Daya;</li> <li>7. Perangkat daerah terkait dari enam provinsi di Tanah Papua;</li> <li>8. Badan Pengarah Papua (BPP/BP3OKP);</li> </ol>



	9. Mitra pembangunan dan pemangku kepentingan terkait.
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	SHEK
<b>Misi/Keterangan</b>	RIPPP - Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai/Polhukam
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan komitmen mendukung agenda Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.</li> <li>2. Keberlanjutan program strategis nasional di Tanah Papua, antara lain Trans Papua, Tol Udara, BBM Satu Harga, KEK Sorong, Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat, kawasan industri, dan sentra pertanian.</li> <li>3. Percepatan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan infrastruktur penunjang daerah otonom baru.</li> <li>4. Penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui koordinasi pusat dan daerah.</li> <li>5. Dukungan terhadap implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai bagian dari pelaksanaan RIPPP dan RAPPP.</li> <li>6. Pengawasan penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur secara efektif dan akuntabel.</li> <li>7. Pengembangan Papua sebagai Provinsi Olahraga.</li> <li>8. Penguatan kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua.</li> <li>9. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, MRP, DPRP, BP3OKP, dan Komite Eksekutif.</li> <li>10. Optimalisasi Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) yang meliputi pendataan OAP, Sekolah Sepanjang Hari, beasiswa OAP, jaminan kesehatan OAP, dan perlindungan sosial OAP rentan.</li> </ol>

<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya kesepakatan bersama enam gubernur se-Tanah Papua dalam mendukung percepatan pembangunan Papua secara terintegrasi.</li> <li>2. Disepakatinya 12 poin Kesepakatan Timika sebagai arah kebijakan bersama pembangunan Papua.</li> <li>3. Menguatnya dukungan terhadap implementasi RIPPP dan RAPPP melalui pendekatan kolaboratif lintas provinsi.</li> <li>4. Diperolehnya dukungan terhadap Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) yang meliputi pendataan OAP, Sekolah Sepanjang Hari, beasiswa OAP, jaminan kesehatan OAP, dan perlindungan sosial OAP rentan.</li> <li>5. Menguatnya sinergi antar pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan percepatan pembangunan wilayah.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tindak lanjut Kesepakatan Timika melalui program dan kegiatan pada masing-masing pemerintah daerah.</li> <li>2. Mengoptimalkan pelaksanaan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) sesuai kesepakatan forum.</li> <li>3. Memperkuat koordinasi lintas provinsi dalam pelaksanaan RIPPP dan RAPPP.</li> <li>4. Mendorong penguatan tata kelola Dana Otsus serta pembentukan mekanisme koordinasi pusat-daerah yang lebih efektif.</li> <li>5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi hasil Kesepakatan Timika di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>6. Mengawal pelaksanaan program prioritas Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua</li> </ol>



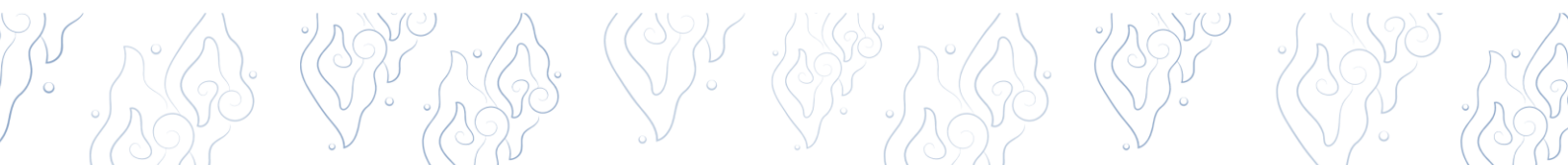
	Damai sebagai bagian dari agenda percepatan pembangunan Papua.
<b>Dokumentasi</b>	

### Kegiatan 5

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Serta BPP PBD dalam Kegiatan Rapat Paripurna III Masa Sidang II Dalam Rangka Pelantikan Pimpinan Wakil Ketua III DPR Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin, 18 Mei 2026 di Rylich Panorama Hotel Sorong
<b>IKU</b>	Indeks Implementasi Pengarahan Percepatan Program Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRP PBD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah. Dalam rangka memperkuat kelembagaan DPR Papua Barat Daya serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dilaksanakan Rapat Paripurna III Masa Sidang II dengan agenda pelantikan Wakil Ketua III DPR Papua Barat Daya. Kehadiran BPP Papua Barat Daya pada kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan sinergi

	antar lembaga dalam mendukung percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Menghadiri undangan Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPR Papua Barat Daya dalam rangka pelantikan Wakil Ketua III DPR Papua Barat Daya serta memperkuat koordinasi dan hubungan kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan DPR Papua Barat Daya.
<b>Peserta Kegiatan</b>	Kegiatan dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Forkopimda Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta BPP Papua Barat Daya.
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi dan Harmonisasi
<b>Misi/Keterangan</b>	RIPPP
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	Rapat Paripurna dilaksanakan dengan agenda utama pelantikan Wakil Ketua III DPR Papua Barat Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan harapan agar pimpinan DPR Papua Barat Daya yang baru dilantik dapat memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya.
<b>Hasil Kegiatan</b>	Pelaksanaan Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPR Papua Barat Daya berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pelantikan Wakil Ketua III DPR Papua Barat Daya. Kegiatan ini memperkuat struktur kelembagaan DPR Papua Barat Daya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga

	<p>representasi masyarakat. Kehadiran BPP Papua Barat Daya juga memperkuat hubungan koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan DPR Papua Barat Daya dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta percepatan pembangunan daerah.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>BPP Papua Barat Daya akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan DPR Papua Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), khususnya terkait pengawalan implementasi RIPPP, RAPP Tahun 2025–2029, serta berbagai program strategis yang mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Selain itu, diperlukan penguatan komunikasi dan kolaborasi antara DPR Papua Barat Daya, Pemerintah Daerah, dan BPP dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua secara efektif dan berkelanjutan.</p>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	 <p>The top photograph shows a group of officials, including military and police personnel, seated in a conference room. They are engaged in a discussion. The bottom photograph shows a group of officials standing in front of a large screen displaying the meeting agenda. The screen text includes: 'RAPAT PARTISIPASI KEKEMUKAAN BERKUALITAS - KEBERKUALAN PERSAWANGKONGAN', 'MEMPERALU: DPR PAPUA BARAT DAYA, KEMUKAAN BERKUALITAS', 'MISKAMANE PERSAWANGKONGAN', 'RITA, HARA, JARACHA 2024-2029', and 'RABOHAN 24 MEI 2024'.</p>



## Kegiatan 6

<b>Nama Kegiatan</b>	Rapat Internal Tindak Lanjut Pengaduan tentang Hak Ulayat atas Tanah Adat Pulau Gag
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu, 20 Mei 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menerima surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Sekretariat Wakil Presiden Nomor B-02/SWP/D-3/KN.01.00/05/2026 perihal Permohonan dan Pengaduan tentang Hak Ulayat atas Tanah Adat Pulau Gag. Surat tersebut memuat pengaduan terkait klaim hak ulayat atas wilayah adat di Pulau Gag yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Menindaklanjuti surat dimaksud, BPP Papua Barat Daya melaksanakan rapat internal guna melakukan kajian awal terhadap substansi pengaduan serta menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kewenangan BPP dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian terhadap substansi surat pengaduan terkait hak ulayat atas Tanah Adat Pulau Gag.</li> <li>2. Mengidentifikasi langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia.</li> <li>3. Menghimpun masukan dan pertimbangan dari Pokja terkait terhadap isu hak ulayat yang disampaikan.</li> <li>4. Menyusun rekomendasi awal sebagai bahan koordinasi dengan para pihak terkait.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	Tim BPP Papua Barat Daya

<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Evaluasi dan Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif dan Papua Damai/Polhukam
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan surat Sekretariat Wakil Presiden Nomor B-02/SWP/D-3/KN.01.00/05/2026 terkait permohonan dan pengaduan hak ulayat atas Tanah Adat Pulau Gag.</li> <li>2. Telaahan terhadap klaim kepemilikan hak ulayat yang disampaikan oleh pihak pengadu.</li> <li>3. Identifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam proses verifikasi lapangan.</li> <li>4. Pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa hak ulayat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>5. Penentuan langkah koordinasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPP Papua Barat Daya menilai bahwa substansi pengaduan memerlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut di lapangan sebelum dapat ditarik kesimpulan terkait keabsahan klaim hak ulayat yang disampaikan.</li> <li>2. Diperoleh kesepakatan bahwa proses verifikasi harus melibatkan unsur pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat guna memperoleh informasi yang objektif dan komprehensif.</li> <li>3. Diketahui bahwa klaim hak ulayat atas wilayah Pulau Gag tidak hanya disampaikan oleh satu pihak sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang memiliki kepastian hukum.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pertemuan dan verifikasi lapangan dengan melibatkan pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh</li> </ol>

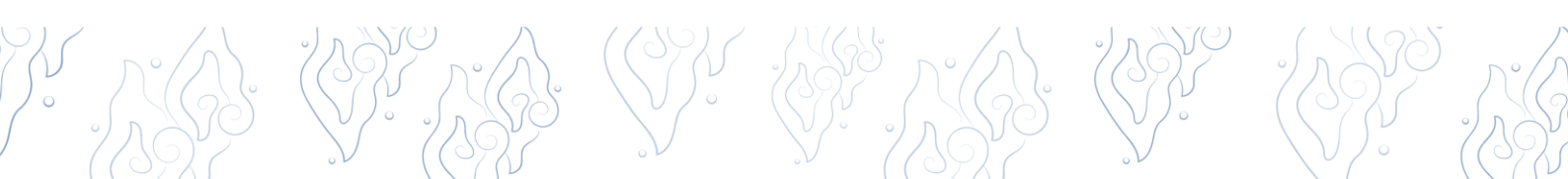
	<p>agama guna menguji validitas klaim hak ulayat yang disampaikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong para pihak yang memiliki klaim kepemilikan hak ulayat atas wilayah yang sama untuk menempuh mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum perdata guna memperoleh kepastian hukum yang sah dan mengikat.</li> <li>3. Melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan penyelesaian permasalahan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Menyusun laporan hasil kajian dan rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut kepada Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.</li> </ol>
<b>Dokumentasi</b>	-

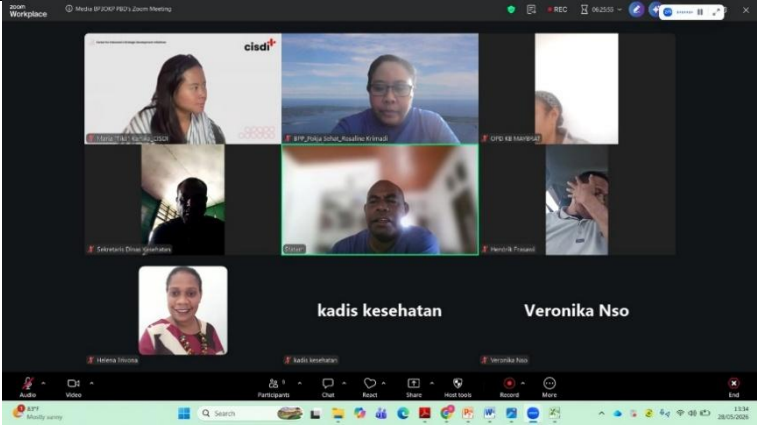
### Kegiatan 7

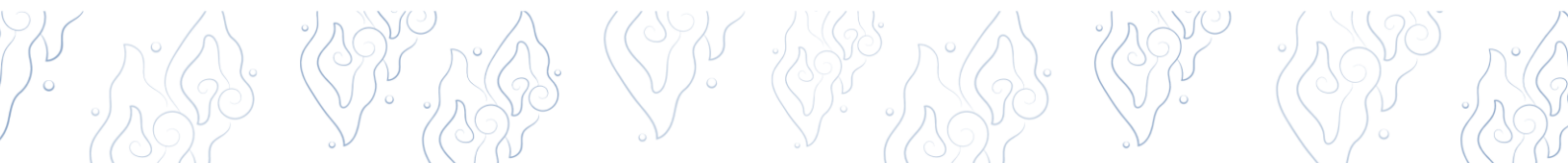
<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Misi Strategis Bersama: Koordinasi Persiapan Kampung Sehat, Cerdas, dan Produktif di Ayata (Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 28 Mei 2026 melalui Zoom Meetings/Daring
<b>IKU</b>	Indeks Efektivitas Pelaksanaan SHEK untuk Percepatan Pembangunan Papua
<b>Latar Belakang</b>	Konsep Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif merupakan inisiatif pembangunan kolaboratif yang berkembang dari Kabupaten Maybrat sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara terpadu. Konsep tersebut mengintegrasikan intervensi pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat dalam satu lokus

	<p>pembangunan kampung. Dalam pengembangannya, BPP Papua Barat Daya berkolaborasi dengan Universitas Papua (UNIPA) dan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) guna merumuskan model pembangunan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Tanah Papua. Sebagai langkah awal implementasi, dilaksanakan koordinasi persiapan bersama perangkat daerah terkait untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama, dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<p>Melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam rangka persiapan implementasi program Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kampung Ayata melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.</p>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<p>Kegiatan dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya, Prof. Dr. Septinus Fatem dari Universitas Papua (UNIPA), dr. Maria Kartika dari CISDI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maybrat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maybrat, serta perwakilan Bapperida Kabupaten Maybrat.</p>
<p><b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b></p>	<p>SHEK</p>
<p><b>Misi/Keterangan</b></p>	<p>RIPPP</p>
<p><b>Poin-Poin Pembahasan</b></p>	<p>1. Penyampaian konsep Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif sebagai model pembangunan terpadu berbasis kampung.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan Kampung Ayata sebagai lokus awal pelaksanaan program.</li> <li>3. Komitmen perangkat daerah dan mitra pembangunan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif.</li> <li>4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan pembagian peran masing-masing pihak.</li> <li>5. Pembahasan jadwal pelaksanaan kunjungan lapangan dan identifikasi kebutuhan awal di Kampung Ayata.</li> <li>6. Strategi pelibatan masyarakat dan pemerintah kampung dalam implementasi program.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapai kesepakatan bersama untuk melaksanakan program Kampung Sehat, Kampung Cerdas, dan Kampung Produktif di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah.</li> <li>2. Terbangun komitmen kolaboratif antara BPP Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Maybrat, UNIPA, dan CISDI dalam mendukung pelaksanaan program.</li> <li>3. Tersusun jadwal awal pelaksanaan kegiatan dan tahapan persiapan lapangan.</li> <li>4. Disepakati perlunya pelaksanaan kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan masyarakat.</li> <li>5. Tersusunnya laporan hasil pertemuan dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan tindak lanjut.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kunjungan lapangan ke Kampung Ayata sesuai jadwal yang telah disepakati.</li> <li>2. Menyusun rencana aksi bersama yang memuat peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam implementasi program.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi produktif sebagai dasar penyusunan intervensi program.</li><li>4. Memperkuat koordinasi lintas OPD dan mitra pembangunan guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.</li><li>5. Menjadikan Kampung Ayata sebagai model percontohan pembangunan kolaboratif yang dapat direplikasi pada wilayah lain di Provinsi Papua Barat Daya.</li></ol>
<b>Dokumentasi</b>	



## **BAB IV**

### **CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

#### **4.1 Capaian**

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK yang telah dilakukan oleh BPP Papua Barat Daya pada bulan Mei 2026, berikut beberapa capaian dan/ atau kemajuan strategis yang diperoleh:

##### **1. Penguatan Pelaksanaan SHEK dan Kolaborasi Lintas Sektor**

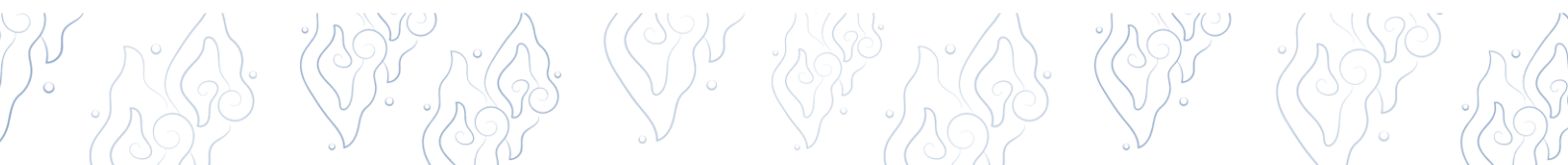
- a. Meningkatnya pelaksanaan fungsi SHEK melalui berbagai forum koordinasi, audiensi, FGD, konsultasi, dan rapat lintas sektor.
- b. Menguatnya sinergi antara BPP Papua Barat Daya dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat.
- c. Terbangunnya komunikasi yang lebih intensif dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya berbasis RIPP dan RAPP.

##### **2. Penguatan Misi Papua Sehat**

- a. Terlaksananya forum koordinasi dan SHEK terkait penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
- b. Menguatnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, yayasan kesehatan, dan perangkat daerah dalam mendukung penanganan HIV/AIDS, TB, malaria, ODGJ, dan NAPZA.
- c. Teridentifikasinya berbagai kebutuhan penguatan sistem pelayanan kesehatan, penguatan SDM kesehatan, dan tata kelola program kesehatan daerah.
- d. Terbangunnya komitmen lintas sektor untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan dalam RIPP dan RAPP.

##### **3. Penguatan Misi Papua Cerdas**

- a. Menguatnya koordinasi dengan pemerintah daerah, Bappenas, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan terkait program pendidikan di Tanah Papua.
- b. Terbangunnya dukungan terhadap pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai salah satu program prioritas percepatan Papua Cerdas.



- c. Meningkatnya dukungan terhadap revitalisasi pendidikan vokasi dan pengembangan Akademi Komunitas di Papua Barat Daya.
- d. Teridentifikasinya berbagai kebutuhan penguatan tata kelola pendidikan dan peningkatan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua.

#### **4. Penguatan Misi Papua Produktif**

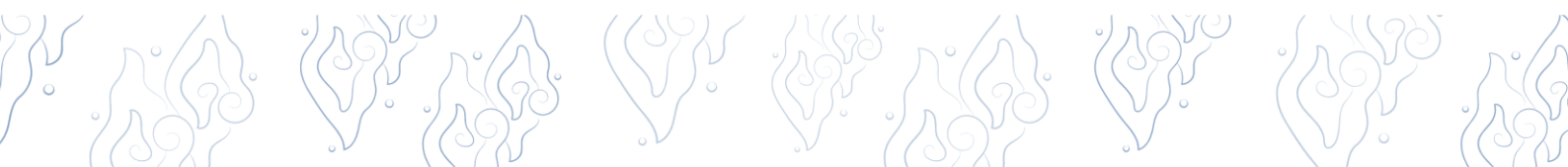
- a. Terlaksananya SHEK terkait pengembangan investasi, ekspor-impor, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan PAD.
- b. Teridentifikasinya berbagai potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menguatnya koordinasi dengan pelaku usaha, perbankan, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
- d. Terbangunnya berbagai rekomendasi strategis terkait pengelolaan sumber daya alam dan penguatan BUMD.

#### **5. Penguatan Misi Papua Damai**

- a. Menguatnya koordinasi dengan unsur keamanan, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dalam mendukung stabilitas daerah.
- b. Terlaksananya berbagai forum dialog dan komunikasi dalam rangka menjaga harmonisasi sosial masyarakat.
- c. Teridentifikasinya berbagai isu strategis terkait hak ulayat, keamanan wilayah, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Terbangunnya sinergi antara BPP Papua Barat Daya dengan aparat keamanan dan organisasi masyarakat dalam mendukung Papua Damai.

#### **6. Penguatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Papua**

- a. Terlaksananya partisipasi aktif BPP Papua Barat Daya dalam rangkaian Musrenbang Otsus dan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua.
- b. Teridentifikasinya berbagai permasalahan perencanaan pembangunan yang memerlukan perbaikan tata kelola.
- c. Tersusunnya berbagai masukan dan rekomendasi terhadap proses perencanaan pembangunan daerah berbasis RIPP dan RAPP.
- d. Menguatnya fungsi evaluasi pembangunan melalui pelaksanaan desk Musrenbang dan forum koordinasi lintas sektor.



## 4.2 Permasalahan

Meskipun berbagai capaian telah diperoleh selama pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK pada bulan Mei 2026, masih terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut bersama, antara lain:

### 1. Belum Optimalnya Sinkronisasi Program dan Perencanaan Pembangunan

- a. Masih ditemukan program dan kegiatan perangkat daerah yang belum sepenuhnya mengacu pada RIRPP dan RARPP.
- b. Masih terdapat usulan program yang belum didukung analisis kebutuhan dan data yang memadai.
- c. Koordinasi antar OPD dalam penyusunan program pembangunan masih belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan.

### 2. Permasalahan Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan ATM

- a. Kasus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) masih menjadi tantangan serius di Papua Barat Daya.
- b. Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan masih ditemukan pada beberapa wilayah.
- c. Ketergantungan terhadap dukungan lembaga donor masih cukup tinggi dalam pelaksanaan program ATM.
- d. Belum optimalnya integrasi program lintas sektor dalam mendukung penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan Malaria.

### 3. Permasalahan Pendidikan dan Pengembangan SDM

- a. Masih terdapat kesenjangan akses pendidikan pada wilayah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
- b. Program pendidikan vokasi dan pengembangan keterampilan masyarakat masih memerlukan dukungan kelembagaan dan pembiayaan yang lebih kuat.
- c. Masih diperlukan harmonisasi model pendidikan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua.

### 4. Permasalahan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

- a. Kondisi jalan dan jembatan pada beberapa wilayah masih menjadi hambatan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- b. Keterbatasan akses transportasi berdampak pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi hasil produksi masyarakat.



- c. Beberapa usulan pembangunan infrastruktur masih memerlukan dukungan perencanaan teknis yang lebih matang.

#### **5. Permasalahan Pengelolaan Data dan Tata Kelola OAP**

- a. Validitas dan sinkronisasi data Orang Asli Papua (OAP) masih memerlukan penguatan.
- b. Masih ditemukan perbedaan data antar lembaga dan tingkatan pemerintahan.
- c. Penggunaan data sebagai dasar perencanaan pembangunan belum sepenuhnya optimal.

#### **6. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Daerah**

- a. Potensi ekspor komoditas unggulan daerah belum didukung oleh sistem logistik yang memadai.
- b. Keterbatasan kapasitas angkut udara dan laut masih menjadi hambatan pengembangan ekspor.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat masih memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan.

#### **7. Permasalahan Stabilitas Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan**

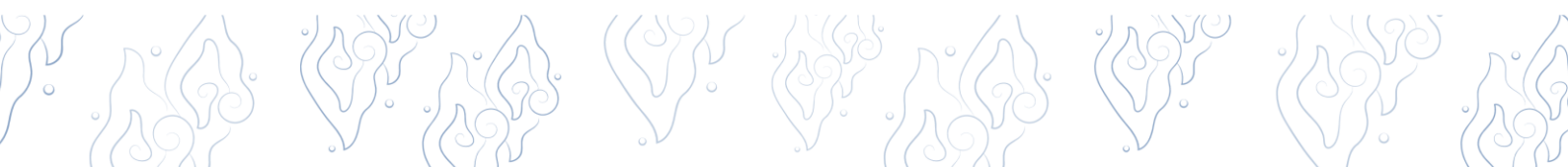
- a. Masih terdapat berbagai aspirasi masyarakat terkait hak ulayat, pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan manfaat pembangunan.
- b. Koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian isu sosial kemasyarakatan masih perlu diperkuat.

### **4.3 Tantangan**

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya, terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan ditangani secara berkelanjutan, yaitu:

#### **1. Penguatan Peran BPP dalam Pelaksanaan SHEK**

- a. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya sebagai fasilitator, mediator, dan penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
- b. Memastikan seluruh hasil SHEK dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh pihak terkait.



**2. Penguatan Integrasi Program Berbasis RIPPP dan RAPP**

- a. Menjamin agar seluruh program pembangunan daerah selaras dengan target RIPPP dan RAPP.
- b. Mendorong penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.

**3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar**

- a. Mendorong pemerataan akses layanan kesehatan dan pendidikan pada wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
- b. Memastikan keberlanjutan program pelayanan dasar yang berdampak langsung bagi Orang Asli Papua.

**4. Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah**

- a. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.
- b. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Papua Barat Daya.

**5. Penguatan Sistem Data dan Informasi Pembangunan**

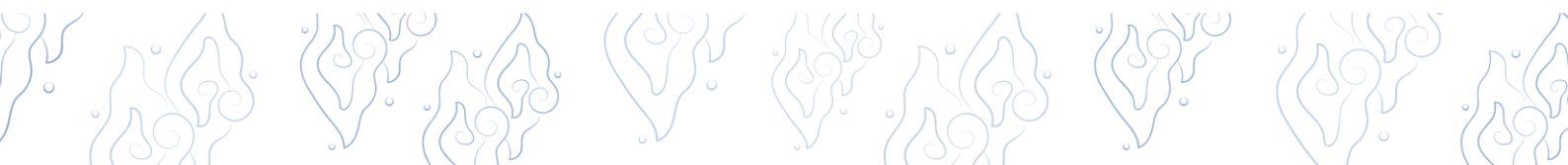
- a. Mewujudkan sistem data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- b. Memperkuat validasi dan pemutakhiran data Orang Asli Papua secara berkelanjutan.

**6. Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Daerah**

- a. Mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai tambah ekonomi.
- b. Meningkatkan keterlibatan Orang Asli Papua dalam aktivitas ekonomi produktif dan investasi daerah.
- c. Memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

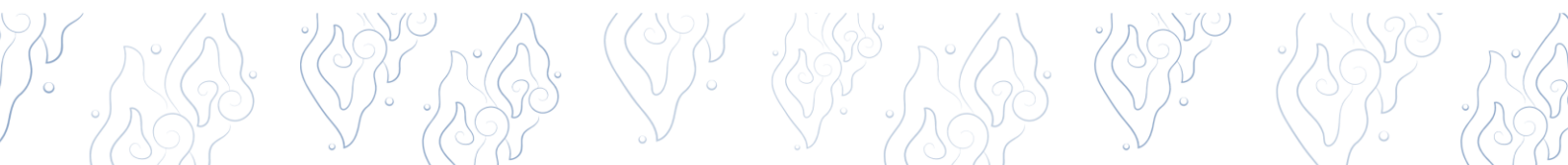
**7. Penguatan Stabilitas Sosial dan Papua Damai**

- a. Membangun mekanisme penyelesaian masalah yang mengedepankan dialog, partisipasi masyarakat, dan pendekatan budaya.
- b. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas daerah.



**8. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Pembangunan**

- a. Memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan mitra pembangunan lainnya.
- b. Meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Papua Barat Daya.



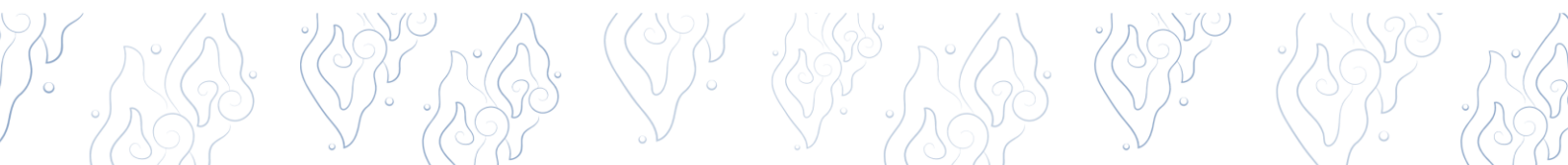
## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Mei 2026, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BPP Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pada berbagai sektor pembangunan yang mencakup Misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai.
2. Pelaksanaan SHEK berhasil memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.
3. Berbagai forum koordinasi, audiensi, Focus Group Discussion (FGD), rapat koordinasi, konsultasi, dan kegiatan strategis lainnya telah menghasilkan berbagai masukan, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut yang mendukung implementasi RIPPP dan RAPPP di Provinsi Papua Barat Daya.
4. Pelaksanaan SHEK pada sektor kesehatan menghasilkan berbagai rekomendasi dalam penguatan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM), peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan.
5. Pelaksanaan SHEK pada sektor pendidikan menghasilkan berbagai rekomendasi terkait penguatan pendidikan vokasi, pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan sumber daya manusia Orang Asli Papua.
6. Pelaksanaan SHEK pada sektor ekonomi dan pembangunan daerah menghasilkan berbagai rekomendasi terkait penguatan investasi, pengembangan komoditas unggulan daerah, peningkatan Pendapatan Asli



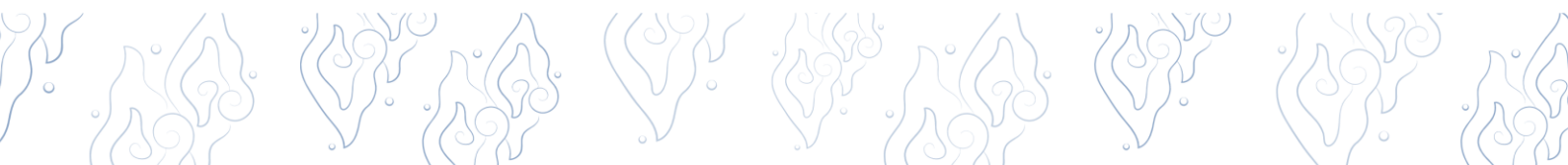
Daerah (PAD), pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

7. Pelaksanaan SHEK pada sektor Papua Damai turut mendukung penguatan stabilitas sosial, peningkatan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta penyelesaian berbagai persoalan strategis melalui pendekatan dialog dan koordinasi.
8. Meskipun berbagai capaian telah diperoleh, masih terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang memerlukan perhatian bersama, terutama terkait sinkronisasi program pembangunan, kualitas data, konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

## 5.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas berbagai hasil SHEK yang telah dilaksanakan selama bulan Mei 2026, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan RIPP dan RAPP sebagai pedoman pembangunan Papua.
2. Perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, analisis kebutuhan, dan indikator kinerja yang terukur.
3. Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan, khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan dasar.
4. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan konektivitas wilayah guna mendukung akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Perlu dilakukan penguatan sistem pendataan Orang Asli Papua (OAP) secara terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
6. Perlu ditingkatkan dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal, investasi daerah, hilirisasi sumber daya alam, serta pemberdayaan usaha masyarakat dan Orang Asli Papua.



7. Perlu dilakukan penguatan kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga adat dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.
8. Hasil-hasil SHEK yang telah dilaksanakan perlu ditindaklanjuti melalui forum koordinasi lanjutan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

### **5.3 Penutup**

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Periode Mei 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan kebijakan bagi berbagai pihak dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Papua yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan dalam RIPP dan RAPP.

Atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih.